

BAB II

KAJIAN MATERI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Karakter dan Pendidikan Karakter

a. Sumber-Sumber Karakter

Sumber karakter adalah sesuatu nilai yang dianggap berharga bagi kehidupan manusia secara kelompok maupun individu. Disamping itu, mengutip maksudin (2013, hlm. 7) mengemukakan bahwa: “nilai dasar kehidupan adalah sesuatu yang dianggap berharga bagi kehidupan. nilai- nilai dasar dapat dikatagorikan berkaitan dengan hubungannya dengan nilai, antara lain: 1)tuhan yang maha esa; 2)kehidupan (manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan); dan 3)bukan kehidupan (tanah, air, udara, dan sebagainya)”.

Demikian menurut Suyanto dikutip maksudin (2013, hlm. 8) menyebutkan ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur yang universal pada manusia, yaitu: 1) cinta Tuhan dan segenap ciptaannya; 2) Kemandirian dan tanggung jawab; 3) Kejujuran/amanah;4) Hormat dan santun; 5) Dermawan, suka tolong- menolong dan gotong-royong/kerja sama; 6) Percaya diri dan pekerja keras; 7) Kepemimpinan dan keadilan; 8) Baik dan rendah hati; dan 9) Toleransi, kedamaian dan kesatuan.

Sedangkan menurut Slamet dikutip oleh Maksudin (2013, hlm.8) menyebutkan bahwa: ada sejumlah nilai dasar yang membentuk karakter iman dan takwa terhadap tuhan yang maha esa, respek kepada diri sendiri dan kepada orang lain, tanggung jawab, kepedulian, kejujuran dan kebersihan, keadilan, perdamaian, kebebasan, rasa kasih sayang, solidaritas, toleransi, hak asasi manusia,kebahagian demokrasi, kesopanan, kebenaran, disiplin diri, kesehatan, kerajinan, keberanian moral, integritas, dan keharmonisan dengan lingkungan.

Oleh karena itu, memahami dari lima nilai sebagaimana yang terdapat pada sila Pancasila yang secara kebulatan merupakan prinsip pemberdayaan dan pembudayaan serta menjadi nilai dasar dari implementasi pada pengabdian diri bagi setiap warga negara yang ada pada usaha pencapaian keutuhan dari pemberdayaan manusia Indonesia di dalam prinsip bela negara dan bangsa dengan tujuan menjaga dan membudayakan kehidupan pada tata bina rumah tangga dalam menciptakan suasana dari berkehidupan negara dan bangsa serta untuk bisa memiliki penjiwaan karakter yang sejatinya merupakan sikap dari tanda menandai akan nilai-nilai kehidupan pada nilai dari implementasi kehidupan yang menjadi keutuhan nilai pada kewarganegaraan bangsa dan negara yang secara karakter bisa menandai sikap dari penjiwaan manusia Indonesia yang seutuhnya di dalam susunan yang telah terselenggarakan oleh pemerintah negara, dengan kesadaran berdasarkan dasar landasan hukum formil bangsa dan negara. Disamping itu, kesamaan nilai di dalam wadah pada perwujudan dari nilai kebangsaan pada penjiwaan kewarganegaraan menitik pada nilai keteraturan dari keutuhan wadah di dalam menghubungkan nilai-nilai dasar pada acuan nilai susunan dari nilai-nilai pedoman pranata kehidupan sosial masyarakat. Demikian bunyi dari lima prinsip yang menjadi hubungan terjadinya nilai pada sesuatu perwujudan nilai pada sistem kehidupan negara dan bangsa yang secara produk hukum telah menjadi nilai kesepakatan bersama pada bentuk susunan negara dan terkandung menjadi filosofi kehidupan negara. Sebagaimana, berdasarkan bunyi dari alenia ke-empat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “. . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan negara republik Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Demikian pada sifat kodrati manusia, manusia adalah makhluk sosial, sebagaimana menurut A.Kosasih djahiri dikutip oleh maksudin (2013, hlm. 9) mengemukakan bahwa:

Manusia memiliki beberapa sifat. Diantaranya manusia sebagai makhluk sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, manusia selalu berkelompok (*group base*), baik kontekstual maupun kondisional, bersifat monomultiplex atau pluralistic, merupakan insan politik yang terorganisir (*zoon politicon, organized political man*), merupakan insan yang terikat dalam sejumlah lingkaran kehidupan (*life cycles*) yang multi -aspek dan multi –waktu. *Kedua*, hakikat kodrati tersebut dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan kondisi. Melalui interaksi, hakikat kodrati itu menyebabkan terjadinya proses perkembangan manusia dan melahirkan *produk the real thing of man* atau *human being*. Proses perkembangan tadi tidak bersifat “tidak beraturan” (*normales*) tetapi terikat dan atau terkendali oleh seperangkat tatanan, norma, atau acuan (*norm references*).

Berhubungan dari pandangan akan sifat dan ciri manusia yang selalu hidup berkelompok dan bersifat monomultiplex atau pluralistik yang terikat dalam lingkaran kehidupan juga memahami akan sifat dari hubungan sifat kekerabatan yang ada pada dalam diri manusia terhadap ikatan dari nilai kekerabatan yang telah terhubung didalam penjiwaan moral akan keinginan bersama di dalam kehidupan bernegara.

Sebagaimana menurut Notonagoro (1975, hlm.55-56) dikutip oleh Kaelan (2004, hlm63) menyebutkan bahwa :

“ sebenarnya ada hubungan sebab dan akibat antara negara pada umumnya dan manusia karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. adapun tuhan adalah segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara negara dengan asal mula segala sesuatu, rakyat adalah

jumlah dari manusia-manusia pribadi. Lebih-lebih buat negara kita kekuasaannya dengan tegas dinyatakan ditangan rakyat, berasal dari rakyat. Sebagaimana tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat, dapatlah timbul suatu negara, sehingga dengan tidak secara langsung ada juga hubungan sebab dan akibat. Adil adalah dasar dari cita-cita kemerdekaan setiap bangsa, jika suatu bangsa tidak merdeka tidak mempunyai negara sendiri itu adalah adil. Jadi, hubungan antara negara dan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang terus ada atau mutlak. Dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang sejenis dengan asas hubungan sebab dan akibat atau termasuk dalam lingkungan juga penggerak atau dorongan utama, selanjutnya menurut Notonagoro (1975, hlm 156) melanjutkan bahwa: “. . . selain itu sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari ke-empat sila yang mendahuluinya, maka dari itu tujuan dari bangsa kita dalam bernegara. . .”.

Demikian di dalam hubungan implementatif sumber-sumber karakter terpengaruhi oleh keadaan kondisi, situasi, waktu dan tempat yang dari keadaan itu menghubungkan keadaan kepada sistem organisme yang secara korelasi terdapat masa yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya pada keadaan kondisi, waktu, situasi dan tempat. Hal itu juga yang dilukiskan di dalam suasana kehidupan bernegara dan berbangsa, yang secara wadah menjadi kesatuan keutuhan dari relasi nilai yang disatukan kedalam beberapa instrumen yang menjadi kebulatan prinsip pada wujud nyata dari berpandangan akan penghayatan kehidupan secara lingkup kebiasaan kepada tindakan yang teratur di dalam hubungan sebab akibat dari hubungan yang menjadi kualifikasi pandangan nilai dalam merumuskan sesuatu kebaikan hidup pada tatanan kehidupan sosial atau kepada pranata kehidupan sosial.

Selanjutnya menurut Kaelan (2004, hlm. 64) menjelaskan bahwa:

“. . . berdasarkan hakikatnya bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai

lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Sehingga adanya manusia sebagai akibat adanya tuhan yang maha esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu, adanya tuhan adalah mutlak sempurna dan kuasa tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam (Notogoro, 1975, hlm. 78).

Pada konteks kehidupan negara, sebagaimana pengilhaman nilai disudutkan pada nilai-nilai ke agamaan sedangkan didalam pergaulan di dasarkan akan kepentingan dari tujuan merangkul bersama sebagai perwujudan dari menciptakan kerukunan hidup bersama. Demikian kerukunan hidup terbina jika setiap manusia menghormati arti dari kedudukan manusia satu dengan manusia yang lainnya yang secara hubungan manusia dan manusia teraplikasi pada tatanan pranata dari norma acuan kehidupan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Disamping itu juga, menurut John Locke dikutip oleh maksudin (2013, hlm. 9) mengemukakan bahwa:

“lima sifat natural manusia dalam posisinya sebagai *organized political man*, yaitu suka dihormati, ingin selamat, dan ingin hidup abadi. Kelima sifat ini ditampilkan setiap diri manusia yang bermoral dalam kehidupannya dan bila tidak dikendalikan kelima sifat itu akan berwujud menjadi gila hormat, gila kekuasaan, sok pintar, cari selamat atau aman (antirisiko) sendiri dan takut mati.

Oleh sebab itu, Kesadaran akan lima dari sifat manusia yang sejatinya merupakan nilai yang menjadikan dirinya menjadi sosok yang berdaya akan apa yang dimungkinkan ingin dirinya memiliki secara determinan yang akan menjadi pengetahuan/kognitif dari perbuatan apa yang akan mungkin dipikirkan dalam melakukan tindakan tersebut agar bisa menjadi sebuah perbuatan, tentunya di dalam itu juga perlu tindakan yang menjadi keteraturan akan kehadiran nilai yang seyoganya bisa menginventarisasi dari semua tindakan kepada keteraturan nilai tersebut. Oleh karena itu, di dalam pola kehidupan tentu ada norma atau aturan dasar hidup manusia yang menjadikan sumber keteraturan dari tanda yang

menandai sebuah nilai karakter di dalam menampilkan suatu perwujudan sifat atau keadaan yang bisa mengendalikan diri dalam menertibkan suasana kehidupan manusia terhadap penciptaan lingkungan yang tertib dan teratur sesuai asas perwujudan bersama.

Demikian menurut maksudin (2013, hlm. 9) mengungkapkan bahwa:

“Dalam masyarakat Indonesia setidaknya ada enam norma acuan pokok yang menuntun atau mengendalikan diri dalam kehidupan manusia, yaitu norma agama, budaya agama, budaya adat atau tradisi, hukum positif atau negara, norma keilmuan dan norma metafisis (hal ihwalnya diluar jangkauan kemampuan manusia, alam gaib –kepercayaan). Keenam acuan normatif tersebut ada dalam setiap lingkaran, aspek dan sistem kehidupan manusia. setiap norma melahirkan acuan nilai dan moral.

Sedangkan di dalam dimensi dan sistem kehidupan manusia menurut Talcot Parson dikutip oleh maksudin (2013, hlm 10) menjelaskan bahwa:

“ sistem kehidupan bagi setiap organisme kehidupan manusia memiliki lima sistem: 1) sistem nilai; 2) sistem budaya; 3) sistem sosial; 4) sistem personal; dan 5) sistem organik. Setiap manusia dan sistem kehidupan mereka yang bersifat organisme tidak lepas dari lima sistem itu dan setiap sistem mengacu pada ke-enam acuan yang ada yang dianut dan diyakini oleh orang atau masyarakat dalam kehidupannya”.

Oleh sebab itu, kehidupan manusia sarat atau padat dengan norma –nilai dan moral, bahkan tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari sebuah nilai. Dalam diri dan sistem kehidupan manusia yang bermoral, kelima sistem tersebut senantiasa mengacu kepada semua tatanan nilai-norma dan moral yang berlaku dan diyakini. Memiliki pengalaman belajar dan kemampuan dalam mengoptimisasi di dalam menimbang yang secara instrumental-kontektual dan seimbang menitik beratkan kepada kemampuan intelektual di dalam melakukan proses emoting, spritualisasi dan nilai terhadap keseluruhan sistem dimensi dari

pemberian norma yang ada dalam sistem kehidupan masyarakat dan diyakini oleh seseorang sebelum ia melakukan pengambilan keputusan.

b. Pengertian Karakter

Menurut Majid (2011) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 1) menyebutkan bahwa:

“menurut bahasa (etimologi) istilah karakter berasal dari bahasa latin *Kharakter Kharassaein*, dan *kharax* dalam bahasa Yunani *character* dari kata *charrasein* yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa Inggris *character* dan dalam bahasa Indonesia lazim digunakan dengan istilah karakter. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa departemen pendidikan nasional kata karakter berarti sifat – sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak.

Demikian Heri Gunawan (2017, hlm. 2) mengutip Departemen Pendidikan Nasional (2010) menyebutkan bahwa: “. . . istilah berkarakter artinya memiliki karakter, memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak. Oleh karena itu, individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional yang pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya)”.

Sementara secara terminologi menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 2 - 3) terdapat beberapa pengertian tentang karakter, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yang diantaranya adalah:

1) menurut Hornby dan Parnwell (1972) mendefinisikan karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi; 2) menurut Takdirotun Musfiroh (2008) karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skill*). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti *to mark* atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku; 3) menurut Winne yang memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memmanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, jika apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memmanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan “*personality*”. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral; sedangkan 4) menurut Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan *akhlaq* yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.

Demikian menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 4) mengatakan bahwa: karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang menandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, dan nilai-nilai lainnya. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai dengan potensi dan kesadarannya tersebut.

c. Pendidikan Karakter

Karakter merupakan tanda dari menandai sesuatu nilai yang berkembang pada dalam diri individu di dalam menampilkan nilai-nilai yang secara tindakan dan perbuatan itu nampak terlihat dari dimensi pandangan pada ciri yang menandai pada dalam diri seseorang tersebut dan secara usaha sadar merupakan potensi yang perlu dikembangkan dalam perkembangan pertumbuhan manusia di dalam membentuk manusia yang bijaksana.

Disamping itu, menurut Ramli (2003) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 24) mengatakan, “pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak”. Adapun persamaan antara pendidikan karakter, pendidikan moral dan pendidikan akhlak ialah sama-sama merupakan usaha sadar dari penanaman nilai-nilai terhadap nilai yang menjadi standar dari perilaku individu di dalam berbuat dan bertindak, sedangkan perbedaannya antara lain, pendidikan karakter merupakan usaha sadar dari menandai sikap dan peranan dari pemberdayaan kepada nilai-nilai yang menjadi acuan dasar kehidupan, sedangkan pendidikan moral ialah usaha sadar dari penalaran ilmu pengetahuan kedalam pembentukan sikap kepada implementasi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Demikian juga dengan pendidikan akhlak ialah usaha sadar dari pengamalan nilai-nilai yang secara gabungan adalah kebiasaan –kebiasaan yang bersifat konsisten dan memiliki pola yang tidak tersadari oleh akal akan perbuatan-perbuatan yang secara tersadari tanpa melalui pikiran atau perenungan terlebih dahulu.

Berhubungan dengan peranan pendidikan karakter di dalam membentuk dan membangun nilai-nilai yang menjadi tanda dari menandai nilai-nilai pada acuan nilai kepada nilai kehidupan, menurut Kemendiknas (2010) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 26) menjelaskan, bahwa:

Dalam buku induk kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025, pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan

amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: distortasi dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.

Atas dasar itu, Pendidikan karakter merupakan wacana program pemerintah di dalam membentuk dan membangun karakter warga negara dengan melalui usaha sadar pada penguatan program lintas pendidikan yang telah menjadi program dari perkembangan pendidikan penguatan karakter di sekolah. Sebagaimana, menurut Heri Gunawan (2017, hlm.30) yang mengemukakan bahwa: Pendidikan karakter berfungsi :

- 1) Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik,berpikiran baik, dan berperilaku baik;
- 2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur;
- 3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan prinsip pendidikan karakter.

Adapun pada tahapan pembangunan karakter siswa yang secara ciri dasar karakter merupakan bagian dari pengembangan nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Berdasarkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan menurut Kemendiknas (2010) dikutip Heri Gunawan (2017, hlm. 32) menjelaskan bahwa:

Secara lanjut dengan dasar kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/ hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu; 1) Nilai-Nilai Perilaku Manusia Dalam Hubungannya Dengan

Tuhan Yang Maha Esa; 2) Nilai-Nilai Perilaku Manusia Dalam Hubungannya Dengan Diri Sendiri; 3) Nilai-Nilai Perilaku Manusia Dalam Hubungannya Dengan Sesama Manusia; 4) Nilai-Nilai Perilaku Manusia Dalam Hubungannya Dengan Lingkungannya; 5) Nilai-Nilai Perilaku Manusia Dalam Hubungannya Dengan Kebangsaannya.

Demikian, kemudian dari lima nilai-nilai perilaku manusia tersebut dikembangkan dengan kedalam bentuk realisasi nilai karakter dengan kualifikasi nilai-nilai yang menjadi rana perkembangan perilaku pada dikatonomi di dalam implementasi mengembangkan pendidikan karakter.

Sebagaimana menurut Kemendiknas(2010) dalam judul buku Panduan Pendidikan Karakter yang dikutip oleh Heri gunawan (2010, hlm.33) menjelaskan kemudian dan merinci secara ringkas kelima nilai-nilai tersebut yang harus ditanamkan kepada siswa, Berikut ini adalah deskripsi nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan disekolah, antara lain:

- a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa yaitu merupakan nilai karakter yang berkaitan dengan nilai ini, bahwa nilai karakter yang dikembangkan adalah berupa olah pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya
- b. Nilai Karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi:
 - a. Jujur
Merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri dan pihak lain.
 - b. Bertanggung Jawab
Merupakan nilai karakter dari sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

c. Bergaya hidup sehat

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.

d. Disiplin

Merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

e. Kerja keras

Merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.

f. Percaya diri

Merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.

g. Berjiwa wirausaha,

Merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif

Merupakan berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.

i. Mandiri

Merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

j. Rasa ingin tahu

Merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

k. Cinta ilmu

Meupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama:

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain

Merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.

b. Patuh pada aturan-aturan sosial

Merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain

Merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

d. Santun

Merupakan sifat yang halus dan baik dari sudut pandang, tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang.

e. Demokratis

Merupakan cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan.

a. Peduli sosial dan lingkungan

Merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakanpada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam

yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

- e. Nilai kebangsaan, Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

a. Nasionalis

Merupakan cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.

b. Menghargai keberagaman,

Merupakan sikap memberikan respek/ hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.

d. Urgensi, Tujuan, Fungsi dan Media Pendidikan Karakter

Terkait dengan perlunya pendidikan karakter, sebagaimana Menurut Thomas Lickona (merupakan seorang profesor pendidikan dari Cartland University) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 28) mengungkapkan bahwa:

Ada sepuluh tanda zaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran, 10 tanda zaman itu adalah :

1. meningkatnya kekerasan dikalangan remaja/masyarakat;
2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku;
3. Pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan menguat;
4. Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas;
5. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk;

6. Menurunnya etos kerja;
7. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru;
8. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok;
9. Membudayanya kebohongan/ketidakjujuran; dan
10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian antar;

Sebagaimana menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 29) mengemukakan bahwa: “munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, bisa dimaklumi, sebab, selama ini dirasakan bahwa proses pendidikan dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan, banyak yang mengatakan pendidikan telah “gagal”, karena banyak lulusan lembaga pendidikan Indonesia termasuk sarjana yang pandai dan mahir dalam menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi tidak memiliki mental yang kuat bahkan mereka cenderung ke amoral”.

Berhubungan dengan perihal diatas, ketidakpastian yang terjadi ialah ketika pengabaian nilai-nilai yang terjadi seakan menitik kepada jangkauan materi yang di ajarkan hanya sebatas di dalam suasana ruangan belaka tanpa menitik kepada adanya pemberdayaan nilai-nilai yang menjadi kelangsungan nilai di dalam membudayakan dari akan penerapan nilai-nilai yang menadasi akan perbuatan di dalam bertindak.

Disamping itu, Menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 29) menyebutkan bahwa:

“Dewasanya ini juga banyak pakar di bidang moral dan agama yang sehari-hari mengajar tentang kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang diajarkan. Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja keras, kebersihan dan jahatnya kecurangan. Tapi, nilai-nilai kebaikan itu di ajarkan dan diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal sebagai bahan yang wajib dipelajari. Karena diduga akan keluar dalam kertas soal ujian. Kasus kejujuran yang

diungkapkan oleh seseorang peserta ujian nasional tahun 2010 lalu bahkan menjadi barang yang mahal untuk diperjuangkan di negeri ini”.

Sedangkan menurut Ratna Megawangi (2007) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 30) mengatakan bahwa: di dalam bukunya mencontohkan, bahwa:

“Bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan karakter sejak awal 1980-an, menurutnya pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui *Knowing the good, loving the good, and acting the good*, yakni suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi *habit of the mind, heart, and hands*. Di samping itu, pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa berdasarkan norma yang berlaku pada sistem nilai-nilai Pancasila”.

Hemat pandangan, adapun peran utama pada pendidikan karakter adalah dari lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan adalah media yang sangat strategis dan merupakan faktor dominan dari cara membangun kualitas pembangunan indek manusia yang seutuhnya dan secara integrasi nasional merupakan tulang punggung dari potensi dan keutuhan di dalam membangun karakter pribadi manusia indonesia yang berkarakter seutuhnya. Demikian karakter sejatinya bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, karena lebih dari itu, bahwa pendidikan karakter adalah untuk menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga di dalam kepercayaan diri peserta didik menjadi paham secara pengembangan olah daya ilmu pengetahuan akan mana yang seyoganya benar atau yang mana yang salah/tidak boleh dilakukannya, demikian dari pengetahuan tersebut akan melahirkan rasa kepekaan akan sikap dari merasakan nilai dari kebaikan tersebut dan senantiasa untuk selalu melakukannya.

Oleh karena itu, di dalam strategi pembangunan karakter bangsa, maka dengan memperhatikan olah pengembangan dari tujuan wacana program pendidikan karakter yang telah diwacanakan oleh pemerintah terhadap olah penguatan pendidikan karakter peserta didik dan sebagaimana menitik terutama kepada fokus di dalam implementasi pengembangan nilai-nilai yang menjadi ukuran tanda dari menandai akan pembentukan karakter peserta didik di dalam mendukung dan memperhatikan fasilitasi dari usaha pencapaian nilai-nilai pada pengembangan mutu kualitas pembangunan nasional yang terdapat pada pembangunan indeks manusia Indonesia yang secara fasilitasi perlu didukung berupa hal-hal berikut:

1. Pengembangan kerangka dasar dan perangkat kurikulum, inovasi pembelajaran dan pembudayaan karakter, standarisasi perangkat dan proses penilaian; kerangka dan standarisasi media pembelajaran yang dilakukan secara sinergis oleh pusat-pusat di lingkungan badan penelitian dan pengembangan pendidikan nasional;
2. Pengembangan satuan pendidikan yang memiliki budaya kondusif bagi pembangunan karakter di dalam berbagai modus dan konteks pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan perguruan tinggi dilakukan secara sistematis oleh direktorat terkait di lingkungan kementerian pendidikan nasional;
3. Pengembangan kelembagaan dan program pendidikan nonformal dan informal dalam kerangka rangka pendidikan karakter melalui berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait di lingkungan direktorat jenderal pendidikan nonformal dan informal;
4. Pengembangan dan penyelenggaraan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, baik di jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah maupun pendidikan tinggi yang relevan dengan pendidikan karakter dalam berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat;

5. Pengembangan karakter peserta didik di perguruan tinggi melalui penguatan standar isi dan proses, serta kompetensi pendidikan untuk kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian(mpk), dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat(mbb), penelitian dan pengembangan pendidikan karakter, pembinanaan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan, dan penguatan jaringan informasi profesional pengembangan karakter dilakukan secara sistemik oleh direktorat terkait.(heri gunawan, 2017, hlm. 205)

Disamping itu, perlunya konsep manajemen sekolah yang berkarakter ialah agar sekolah dapat menanamkan nilai-nilai karakter dengan memanfaatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada dan dimiliki oleh sekolah tersebut. sebagaimana yang diungkapkan tersebut bahwa manajemen merupakan bagian pemanfaat dan pemberdayaan seluruh sumber daya (manusia dan sumber-sumber lainnya) melalui mekanisme suatu pendekatan kepada rangka di dalam mencapai tujuan secara proses bisa bersifat arahan, koordinasi dan evaluasi orang –orang guna tujuan untuk pencapaian kurikuler pembelajaran yang afektif dan bernilai pada nilai-nilai yang menjadi tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, urgensi, tujuan, dan fungsi serta media pendidikan karakter merupakan sarana pendukung yang harus menjadi pemanfaatan di dalam memberdayakan suatu pencapaian dari tujuan –tujuan nilai yang secara terlaksana bisa melalui pendidikan maupun sarana – prasarana yang ada di lingkungan masyarakat sosial secara pemerintah maupun organisasi masyarakat.

e. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter

Demikian menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 35) menjelaskan bahwa:

Merekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif, sebagai berikut:

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter;
2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku;
3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter;
4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian;
5. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik;
6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses;
7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik;
8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama;
9. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter;
10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter;
11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik;

f. Ciri Dasar Pengembangan Pendidikan Karakter

Menurut Foorster dalam majid (2010) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm.36) menyebutkan tentang empat dasar pendidikan karakter yaitu:

1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hirarki nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normative dalam setiap tindakan;
2. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh ada prinsip, dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lainnya. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang;
3. Otonomi. Disana seseorang menginternalisasi aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi, ini dapat dilihat dari penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh dari desakan pihak lain;
4. Keteguhan dan kesetiaan, keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas dasar komitmen yang dipilih.

Selanjutnya menurut Majid dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 37) menyebutkan bahwa: “kematangan empat karakter tersebut diatas, memungkinkan seseorang melewati tahap individualis menuju personalitas. Orang-orang modern sering mencampur adukan antara individualis dengan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior. Karakter inilah yang menentukan performa seseorang dalam segala tindakannya”.

Demikian menurut Rosworth Kidder dalam *“how good people make tough choices* (1995) yang dikutip majid dan dikemukakan kembali oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 37) menyampaikan tujuh kualitas yang diperlukan dalam pendidikan karakter:

- a. Pemberdayaan (*empowered*), maksudnya bahwa guru harus mampu memberdayakan dirinya untuk mengajarkan pendidikan karakter dengan dimulai dari dirinya sendiri (*ibda bi al-nafs*)
- b. Efektif (*effective*) proses pendidikan karakter harus dilaksanakan dengan efektif;

- c. *Extended into community* , maksudnya bahwa komunitas harus membantu dan mendukung sekolah dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik;
- d. *Embadded* , integritasikan seluruh nilai ke dalam kurikulum dan seluruh rangkaian proses pembelajaran.
- e. *Engaged*, melibatkan komunitas dan menampilkan topik-topik yang cukup esensial;
- f. *Epistemological*, harus ada koherensi antara cara berpikir makna etik dengan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik menerapkannya;
- g. *Evaluative*, menurut Kidder terdapat lima hal yang harus diwujudkan dalam menilai manusia berkarakter. a) diawali dengan kesadaran etik; b) adanya kepercayaan diri untuk berpikir dan membuat keputusan tentang etik; c) mempunyai kapasitas untuk menampilkan kepercayaan diri secara praktis dalam kehidupan; d) mempunyai kapasitas dalam menggunakan pengalaman praktis tersebut dalam sebuah komunitas; e) mempunyai kapasitas untuk menjadi agen perubahan dalam merealisasikan ide-ide etik dan menciptakan suasana yang berbeda.

g. Tahapan Pengembangan Karakter Siswa

Mengutip Heri Gunawan (2017, hlm. 38) mengemukakan bahwa:

Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan dari pendidikan karakter adalah pada dasarnya untuk mendorong lahirnya anak-anak yang berkarakter *insan kamil*(baik). Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowledge*), dan dilaksanakan (*acting*) serta dilakukan dengan kebiasaan (*Habit*).karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja.

Karena seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, begitupun jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukannya dari kebaikan tersebut. Oleh sebab, karakter menjangkau wilayah dari emosi dan kebiasaan dari olah perkembangan dari intelektual kepribadian diri. Demikian juga diperlukan tiga komponen pembentuk dari karakter yang baik di dalam tiga komponen karakter yang baik (*Components of good character*) yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral) , *moral feeling* (perasaan atau (penguatan emosi) tentang moral) dan *moral action* (perbuatan bermoral).

Adapun Menurut Herry Gunawan (2017, hlm. 39) menyebutkan bahwa:

Dimensi-dimensi yang termasuk kedalam *moral knowing* yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral (*moral awareness*) yakni pengetahuan tentang nilai-nilai moral(*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspektif taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil sikap(*decision making*) dan pengenalan diri (*self knowledge*). *Moral feeling* merupakan penguatan emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. penguatan ini berkaitan dengan membentuk dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (*conscience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*humility*). *Moral action* merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lainnya yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Oleh sebab itu, keterkaitan pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai –nilai perilaku, yang dapat dilakukan dan bertindak secara

bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan Negara serta dunia internasional.

Demikian menurut Mochtar Buchori (2007) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 40) menjelaskan bahwa:

Pengembangan pendidikan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang kuat untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut *Canatio*, dan langkah untuk membimbing anak membulatkan tekad disebut langkah konotatif.

2. Tinjauan Tentang Akhlak dan Pendidikan Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, hlm. 87) kata *akhlak* diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Demikian menurut Abudin Nata (2002, hlm. 2) secara etimologi kata *akhlak* berasal dari bahasa arab, yaitu *isim masdar* (bentuk infinitif) dari kata *Akhlaqa, Yukhliq, Ikhlagan*. Sesuai dengan bentuk *Tsulasi majid wajan af'ala, yuf'ilu, if'alan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *at-tabi'ah*(kelakuan, tabiat, atau watak dasar), *al-adat*(kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah*(peradaban yang baik) dan *al -din*(agama). Demikian menurut Hmzah Ya'qub (1993, hlm.11) mengemukakan “akhlak mengandung segi-segi persesuaian dari kata *Kholqun* yang berarti kejadian serta erat hubungannya dengan *Khaliq* (pencipta) dan *makhluq* (yang diciptakan)”. Disamping itu, Menurut Quraish Shihab (2004, hlm.253) menjelaskan bahwa:

“kata akhlak memiliki makna tabiat, perangai, kebiasaan bahkan agama, tetapi tidak ditemukan dalam al-qur'an yang ditemukan hanya bentuk

tungga dari kata itu yaitu Khuluq (Q.S Al-Qalam (68) ayat ke -4) hanya saja kata akhlaq banyak ditemukan di dalam al-hadits, seperti dalam hadist nabi yang terpopuler “innama Buitsu liutmmimaa makarimal akhlak ‘berarti sesungguhnya aku diutus untuk penyempurnaan akhlak yang mulia’HR.Malik”.

Adapun pengertian akhlak secara terminologis, menurut Harry Gunawan (2017, hlm. 5) merujuk kepada pendapat dari beberapa para ahli, antara lain:

- a. Imam Abu Hamadi al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata (2002, hlm. 4) mengatakan bahwa akhlak adalah “sifat yang tertanam (terpatri) dalam jiwa yang darinya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (perenungan) terlebih dahulu”;
- b. Ibnu Maskawih sebagaimana dikutip oleh Rahmat Djatnika (1996, hlm. 26) mengatakan akhlak adalah: “perangai itu adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan menghajatkan pikiran”;
- c. Ahmad Amin sebagaimana dikutip oleh Hamzah Ya’kub (1993, hlm.12) mengatakan bahwa akhlak adalah: “ suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat”;
- d. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif al-jurjani dalam bukunya al-Ta’rif, sebagaimana dikutip oleh Ali Abdul Halim Mahmud (2004, hlm. 32) “akhlaq adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir atau merenung”;
- e. Menurut Muhammad bin Ali Al-faruqi at-tahanwi sebagaimana dikutip oleh Ali Abdul Halim Mahmud (2004, hlm.34) “akhlaq adalah keseluruhannya kebiasaan, sifat alami, agama, dan harga diri”;

Jadi, berdasarkan pada beberapa penjelasan dan definisi akhlak diatas, dapat di simpulkan bahwa akhlak adalah segala sesuatu yang telah tertanam kuat atau terpatritri dalam diri seseorang, dan yang akan melahirkan sesuatu perbuatan-perbuatan yang secara fungsi otak tanpa melalui pikiran atau perenungan akan terlebih dahulu, artinya bahwa segala perbuatannya itu dilakukan dengan refleksi dan spontan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Jika sifat dari yang tertanam itu darinya maka akan muncul perbuatan-perbuatan yang terpuji - menurut akal rasio dan syariat –maka berdasarkan tindakan sesuai dari menurut sifat tersebut sebagaimana yang dinamakan akhlak yang baik (akhlak al-mahmudah) sedangkan jika terlebih dahulu perbuatan-perbuatan buruk maka sifat dari akhlak tersebut disebut dengan akhlak buruk (akhlak al-mamudah).

b. Pendidikan Akhlak

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang secara pembelajaran dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang afektif dan aktif serta bisa menjadi sarana untuk mengembang potensi-potensi yang ada pada dalam diri peserta didik. Akhlak yang merupakan segala sesuatu yang telah tertanam kuat atau terpatritri dalam diri seseorang, yang kemudian akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang secara tindakan tanpa melalui pikiran atau perenungan terlebih dahulu, dalam hemat pengertiannya yang berarti bahwa segala perbuatannya itu dilakukan dengan refleksi dan spontan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Demikian pada prinsip dasar-dasar dari pandangan sumber nilai yang ada pada pendidikan akhlak yaitu ber-acuan kepada prinsip dasar dari nilai konsep pandangan al-quran dan al-hadist yang sebagaimana dari isi pencapaian nilai itu adalah proses kehidupan yang terkandung di dalam dua perkara yang dipelantarkan melalui wahyu berupa firman dan perkataan dari periwayatan Nabi-Nabi dan Rosul-Rosul Allah SWT/atau Tuhan yang maha esa yang perkara itu di berikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang terpelihara dari perbuatan tercela maupun perbuatan keburukan serta mencegah segala

tindakan dan perbuatan dari tipu daya manusia dan menyampaikan semua perkara langit dan bumi untuk bagi segenap manusia di dalam menata kehidupan dan menganjurkan kepada manusia untuk bisa berlaku adab pada tata kelakuan untuk pengamalan nilai terhadap perilaku tata kelakuan yang ada pada dalam diri manusia yang merupakan sebagai pedoman hidup dari Allah SWT./Tuhan yang Maha Esa (dzat yang bersemayam di atas ar's-nya).

Disamping itu, memahami akan itu juga bahwa sumber akhlak bersumber pada dalam diri manusia sebagai nilai kelakuan dasar dalam bertindak dan yang merupakan nilai keutuhan jiwa yang secara olah perolehan nilai ada dan secara tindakannya terjadi dan dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu (gerak spontan) oleh akal serta atas dasar kelakuan dari apa yang menjadi kuasa Tuhan yang Maha Esa dari apa yang ada pada diri manusia sebagai nilai-nilai keindahan dari keteladanan nilai pada perkara yang ada pada diri manusia di dalam pengilhaman/penginsafan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan untuk bisa membawa kesadaran hidup bahwa hidup itu akan terbatas dari akan kemampuan apa yang kemungkinan tidak bisa diketahui oleh manusia meskipun memiliki akal, disamping itu juga dengan adanya akal akan membawa manusia akan nilai dari nilai pandangan kehidupannya atas apa yang menjadi kesadaran pada nilai –nilai acuan kehidupan. Oleh karena itu akal adalah bagian keistimewahan dari apa yang ada dalam organ tubuh manusia, dan akan mengayomi dirinya pada pembentukan jiwa yang berkepribadian dan berkarakter dari nilai keseluruhan tindakan yang akan bersumber pada nilai-nilai yang terdapat di dalam kualifikasi nilai pada penginsafan nilai yang menjadi nilai penjiwaan karakter kepada nilai karakter akhlak moral yang mulia. Kepribadian dari lingkup akhlak pada dalam diri manusia, Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian akhlak sebelumnya, maka secara usaha sadar dan terencana bahwa pendidikan akhlak merupakan rencana usaha belajar yang terencana pada pembentukan tata kelakuan perilaku tingkah laku hidup yang ada pada dalam diri hidup manusia sebagai tuntunan kesadaran nilai yang terpaterikan pada olah

tindakan dan perbuatan di dalam cara mengolah perilaku yang secara pembelajaran terintegrasi kepada kelakuan dan ke-arifan yang berlaku pada otonomi kepribadian manusia dengan prinsip –prinsip yang ditentukan berdasarkan nilai, norma dan moral yang berlaku pada pranata kehidupan manusia.

Adapun tujuan umum dari pendidikan akhlak menurut beberapa pendapat para ahli seperti, menurut Barnawy Umari (1948, hlm. 2) dalam judul buku materi akhlak menyebutkan bahwa:

1. Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela;
2. Supaya berhubungan kita dengan allah swt dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.

Demikian, menurut Ali Hasan bahwa tujuan pokok akhlak adalah agar setiap orang yang berbudi (berakhlak) bertingkah laku (tabiat) berperangai atau beradat istiadat yang baik atau yang sesuai dengan ajaran. Sedangkan menurut Muhammad ‘Athiyah Al-Abrasyi (2003, hlm. 114) dalam judul buku prinsip-prinsip dasar pendidikan menjelaskan bahwa: “tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam islam adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan mulia dalam bertingkah-laku, perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Jiwa dari pendidikan moral dan akhlak”. Sependapat dengan itu juga, menurut Syaiful Sagala (2017, hlm. 15) dalam judul buku etika dan moralitas pendidikan peluang dan tantangan menyebutkan bahwa:

Perilaku yang berkenaan dengan akhlak berarti bertindak sesuai nilai dan norma moral yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan bukan karena ikut-ikutan atau alasan lain yang tidak memenuhi etika dan moral. . . . akhlak yaitu perilaku yang boleh dan dibolehkan dalam tata perilaku yang universal diakui kebenarannya dan disepakati bahwa perbuatan yang memenuhi etika dan moralitas serta norma yang berlaku secara operasional

dan teknis perbuatan yang memenuhi akhlak mulia(etika) ditampakkan dalam perilaku sehari-hari seperti: mau mendengar dan menghormati pendapat orang lain, menyayangi orang yang lebih lemah darinya, tidak suka menggurui atau menang sendiri, tidak suka menghina atau mengejek orang lain, tidak suka pamer yang menunjukkan kehebatan dan kesombongan tetapi berkontribusi pada orang lain atas kelebihannya, tidak memuji atau dipuji secara berlebihan, jika dapat mengerjakan sendiri tidaklah perlu menyeluruh orang lain (mandiri) tetapi dapat meminta tolong sesuai keperluan dan sebagainya.

Pendidikan akhlak yang merupakan hasil pemikiran dari pangkal pada konsep ajaran islam yang menitik kepada sifat, tabiat, dan nilai-nilai tata kelakuan dari sosok manusia yang menjadi junjungan serta suri tauladan (tokoh panutan tata kelakuan bisa berperilaku arif dan normatif pada pembentukan pranata kehidupan sosial dalam menjalin hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia(sesamanya), manusia dengan lingkungan alamnya, dan manusia dengan kelompok kehidupannya yang luas(bangsa). Demikian, menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 6) menyebutkan bahwa:

Dalam ajaran islam terdapat perbedaan antara akhlak dan etika. Atau dengan kata lain, berbeda antara akhlak dan etika. Jika, etika dibatasi hanya pada sopan santun pada sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat lahiriah. Maka akhlak maknanya lebih luas dari itu, serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Misalnya akhlak kepada allah, dan akhlak kepada sesama makhluk (manusia, binatang, dan kepada makhluk yang lainnya). Disamping itu, sesuatu hal yang menjadi pangkal atau titik tolak akhlak kepada allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa: “laa ilaaha ilallaah” yang berarti tiada tuhan selain allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata allah adalah bentuk perwujudan dari menandai bahwa yang memiliki kuasa atas makhluknya adalah allah, karena sub

kata allah adalah Tuhan. Demikian Tuhan yang dimaksud adalah dia yang memiliki kekuasaan atas kehidupan makhluk yang diciptakannya bisa secara wujud tidak tersentuh maupun yang dapat disentuh.

Sebagaimana, menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 7) menjelaskan bahwa: “allah adalah tuhan yang bersih dari segala sifat kekurangan. Dialah yang maha sempurna. Dialah allah swt adalah pencipta dan pemelihara alan ini. hal tersebut perlu kita ketahui yakini dalam hati. Dialah yang memberikan rahmat dan menurunkan adzab kepada siapa saja yang dikehendakinya”.

Demikian Abudin Nata (2002, hlm. 147-148) dikutip Heri Gunawan (2017, hlm.7) menyatakan bahwa:

Sekurang-kurangnya ada empat alasan kenapa manusia perlu berakhlak kepada manusia: 1) karena allah yang telah menciptakan manusia; 2) karena allah yang telah memberikan perlengkapan panca indra berupa pendengaran, penglihatan, akal-pikiran dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna; 3) karena allah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hajat hidup manusia; 4) karena allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak kepada diri sendiri, yaitu totalitas dan integritas dari rasa yang terinternalisasikan kepada jiwa pada keutuhan diri manusia kepada amal perbuatan dan tindakannya.

Menurut Heri Gunawan (2017, hlm. 10) menyebutkan bahwa: “keberadaan manusia di alam ini berbeda bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, totalitas dan integritasnya selalu ingin merasakan selamat dan mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Hak manusia ini harus seutuhnya di berikan oleh yang merupakan kewajiban dirinya sendiri agar ia selamat, bahagia, masa kini dan mendatang”. Demikian menurut Hamzah Ya’kub (1993, hlm. 138-140) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm.10) mengemukakan bahwa: setiap

manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan mendapat kerugian dan kesulitan.

Dengan karena itu, sesuatu hal yang menjadi kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, sebagaimana menurut Hamzah Ya'kub (1993, hlm. 138-140) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm.10) antara lain: 1) memelihara kesucian diri baik jasmani maupun rohani; 2) memelihara kerapian diri di samping kebersihan jasmani dan rohani perlu diperhatikan faktor kerapian sebagai manifestasi adanya disiplin dan keharmonisan pribadi; 3) berlaku tenang(tidak tergesa-gesa/terburu-buru), ketenangan dalam sikap termasuk kedalam rangkaian akhlakul karimah; 4) menambah pengetahuan. Hidup ini penuh dengan pergulatan dan kesulitan. Untuk mengatasinya pelbagai kesulitan hidup dengan baik diperlukan ilmu pengetahuan. Adakah kewajiban manusia menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini dan untuk beramal sebagai persiapan ke alam baka (Q.S. Az-Zumar (ayat ke -39) : surah ke -9); 5) membina disiplin pribadi, salah satu kewajiban terhadap diri sendiri, melatih diri sendiri untuk membina disiplin pribadi. Disiplin pribadi dibutuhkan sebagai sifat dan sikap yang terpuji (fadillah) yang menyertai kesabaran, ketekunan, kerajinan dan kesetiaan dan lain-lain.

Demikian, akhlak kepada sesama manusia, menurut M.quraish shihab (1996, hlm.266-268) dikutip Heri Gunawan (2017, hlm11) dalam judul buku pendidikan karakter konsep dan implementasi, yang secara sistematis menjelaskan dari apa yang menyangkut tentang akhlak terhadap manusia sebagai berikut:

1. Melarang melakukan hal –hal yang negatif, baik itu bentuknya membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta rampasan tanpa alasan yang benar maupun menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang dibelakangnya tidak peduli aib itu benar atau tidak;
2. Menempatkan kedudukan secara wajar, hal ini dimisalkan Nabi Muhammad Saw, dinyatakan sebagai manusia seperti manusia yang lain

,namun dinyatakan pula bahwa beliau adalah rasul yang memperoleh wahyu dari Allah Swt. Atas dasar itulah beliau berhak memperoleh kehormatan melebihi manusia lain.

3. Berkata yang baik dengan sesama manusia, berkata yang baik dengan sesama manusia artinya pembicaraan kita disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan mitra bicara serta harus berisi perkataan yang benar.
4. Pemaaf. Sifat ini hendaknya disertai dengan kesabaran bahwa yang memaafkan berpotensi pula melakukan kesalahan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan akhlak kepada lingkungan yaitu sebagaimana disebutkan oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 11-12) menjelaskan bahwa: “maksud akhlak kepada lingkungan disini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia baik binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda tak bernyawa”.

Menurut Abudin Nata (2002, hlm. 150) menyebutkan bahwa: “Allah menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda tidak bernyawa yang semuanya memiliki ketergantungan kepadanya, keyakinan ini menghantarkan sesama muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik”.

Olah pada dasarnya akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran terhadap pembiasaan lingkungan, sebagaimana menurut Quraish Shihab (1996, hlm. 270) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 12) menjelaskan bahwa :

Bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbing agar makhluk mencapai tujuan penciptanya. Dalam pandangan akhlak Islam seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar karena itu berarti tidak memberikan kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptanya.

Demikian menurut muhaimin (2001, hlm. 24) menyebutkan bahwa manusia memiliki tugas sebagai khalifah antara lain:

1. Mengkulturkan natur(membudayakan alam) yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia;
2. Menaturkan kultur (meng-alamkan budaya) yaitu, budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan mala petaka bagi manusia dan lingkungannya;
3. Mengislamkan kultur(mengislamkan budaya) yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai islam yang rahmatan lil'alamin sehingga berbudaya berarti mengarahkan segala tenaga cipta, rasa dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran agama islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran allah.

Oleh sebab itu, ditegaskan bahwa setiap manusia dituntut mampu menghormati dari perjalanan proses –proses dari yang sedang berjalan maupun sesuatu proses yang masih terjadi, yang demikian itu juga menghantarkan manusia untuk bertanggung jawab atas segala apa yang telah dibuatnya dan secara tindakan itu berhubungan langsung atas apa yang telah dilakukan atau diperbuatnya karena kembali dari apa yang diperbuat akan berbanding sama atas apa yang dibuat.

3. Tinjauan Tentang Moral dan Pendidikan Moral

a. Pengertian Moral

Moral merupakan sebuah tata laku atau perbuatan yang berasal dari bentuk kesadaran individu atau diri sendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Adapun menurut Djawan Dahlan (2015, hlm. 132) menjelaskan, bahwa:

Istilah berasal dari kata latin “*mos*” (*moris*) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tatacara kehidupan. sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai –nilai moral itu seperti, (a) seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain, dan (b) larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum-minuman keras dan berjudi. Seorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosial.

Demikian istilah kata moral menurut kamus besar bahasa indonesia, yang berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya atau kondisi mental yang membuat orang berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya serta bisa juga berarti ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Secara umum, istilah moral adalah sebuah nilai bentuk gambaran kebiasaan yang sering digunakan untuk melukiskan tata laku dari kualifikasi nilai kedalam menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Moral juga selain berdampak kepada individu di dalam mengembangkan pengetahuan kepribadian dirinya, disisi lain juga sangat berkaitan langsung pada ciri dari penandaan pola yang menjadi pemikiran awal kepada konsep penilaian yang pada akhir sebisanya dapat memberikan kontribusi bagi orang lain untuk mengalami akan dampak dari sebuah nilai yang menjadi dasar kelakuan dari berlakunya konsep nilai pada nilai yang berlaku kepada tata kelakuan dirinya dan orang lain.

Disamping itu, kualifikasi dari Moral yang baik atau buruk, tergantung pada nurani dan budi pekerti yang dimiliki oleh masing-masing individu maupun orang lain. Karena setiap orang memiliki pemahaman dan penerapan akan gambaran tentang sifat kualifikasi budi pekerti yang berbeda-beda pula, maka moral dari setiap orang memungkinkan juga akan berbeda-beda. Karena setiap kualifikasi

penilaian tentang baik atau buruknya moral dari seseorang akan berdampak langsung kepada sebuah kelompok/organisasi, dan masyarakat akan sifat dari gambaran baik dan buruk nilai perbuatan tersebut.

Sehingga moral selalu berkaitan dan berhubungan dengan tindakan perbuatan dari penanaman nilai budi pekerti. adapun yang dimaksud dengan istilah budi pekerti merupakan sebuah nilai luhur yang dimiliki seseorang karena adab kebiasaan yang diterapkan sejak dahulu dan mengakar dan menjadi sesuatu adab nilai kebiasaan hidup dari perbuatan yang dilakukan sehari-hari dari objek nilai perbuatan sikap individu yang baik atau ciri dari nilai tata kelakuan adab kebiasaan pada dalam diri pribadi manusia sebagai nilai dari perwatakannya/karakter nilai tanda yang menandainya. Sebagaimana contoh konkret yang dapat ditunjukkan melalui tindakan itu yang dilakukan sehari-hari oleh seorang individu di ruang lingkungan masyarakat ialah dengan semisalnya perbuatan yang secara umum diterima seperti perilaku dari tata laku sikap yang bernilai terpuji dan mulia.

Demikian beberapa tata kelakuan perilaku yang terpuji dan mulia, sebagaimana tanda yang menandai sebuah nilai yang merupakan lukisan dari contoh nilai moral atau budi pekerti yang diterima dan terjadi di ruang lingkungan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bicara dengan Sopan, yaitu merupakan tindakan yang mengkedepankan nilai dari menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai keteraturan dari adab tradisi kebiasaan hidup dari kelayakan adab komunikasi yang dianggap etis. Seperti dengan ciri umum adalah ketika anak muda berbicara dengan orang lain yang lebih tua. Misalnya pada saat sedang berbicara, seseorang tersebut bisa menyesuaikan tutur lisannya kepada lawan bicarannya dengan memahami kearifan pada jenis dari tingkatan lawan bicarannya dengan tutur yang etis atau diterima dan serta bernada rendah. Atau secara mimik bicara bisa terlihat dari gaya bicara dan penuturan yang diucapkan dengan keteraturan intonasi yang tidak tinggi serta tidak melibatkan emosi secara yang berlebihan. Contoh

untuk sikap ini sangat banyak dan beragam, misalnya seorang murid terhadap guru, seorang rekan kerja dengan rekan kerja yang lain, seorang anak kepada ibu, dan lain sebagainya.

2. Sikap Rendah Hati yaitu sebagaimana sebuah perilaku nilai yang diwujudkan dalam tindakan maupun perilaku yang mencerminkan diri seseorang melalui perbuatan nyata antara hubungan dirinya dengan orang lain dengan baik maupun secara hubungannya pada suatu kelompok maupun hubungan dalam lingkungan luas (masyarakat). Sementara sikap rendah hati ini juga, terkait dengan sikap pengayoman seperti sopan dan tidak menyombongkan diri. Seperti contoh sikap rendah diri adalah ketika seseorang murid menjadi juara sekolah dan murid tersebut tidak menyombongkan kepiantarannya dalam hal prestasinya tersebut, maka murid tersebut dapat dikatakan memiliki moral yang baik, karena murid tersebut telah diberi pengetahuan tentang bentuk sosok kepribadian yang baik dalam sikap yang terpuji.

Oleh karena itu, moral dan budi pekerti merupakan generalisasi dari tata laku kebiasaan individu atau kelompok yang melukiskan pada sebuah nilai karakter baik dan buruknya dari tindakan dan perbuatan yang secara nyata mencerminkan kebiasaan hidup dari nilai tingkatan kualifikasi kepribadian jati diri individu maupun kelompok yang memungkinkan kelompok atau individu menilai ada dan dibuat secara keadaan nilai dari menentukan kebiasaan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar.

b. Pendidikan Moral

Pendidikan moral merupakan teori perkembangan moral yang dipelopori oleh teori perkembangan moral dari teori Kohlberg yang disebut dengan teori pendekatan kognitif. Demikian ruang lingkup pendidikan moral mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan perilaku yang baik, jujur dan

penyayang –dapat dinyatakan dengan istilah bermoral. Sedangkan pada tujuan utama dari pendidikan moral yaitu untuk menghasilkan individu yang otonom, yang memahami nilai-nilai moral dan memiliki prinsip/komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut. disamping itu, pendidikan moral mengandung beberapa komponen yaitu: pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan dan memperhatikan kepentingan orang lain, serta tendensi moral.

Menurut Kohlberg dikutip oleh Darmayati Zuchdi (2009, hlm. 11-12) menyebutkan bahwa:

moralitas bukanlah nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan sosial. Apabila seseorang menghadapi nilai-nilai yang bertentangan, ia tidak mudah untuk memilih nilai yang mana yang ada dalam lingkungan sosialnya yang harus dianut. Ketika seseorang menghadapi dilema moral, yakni harus memilih dua kebenaran yang sangat sulit untuk memutuskannya, ia harus benar-benar mempertimbangkan konsekuensi dari keputusannya.

Disamping itu, moral yang di identifikasikan sebagai bentuk esensial dari perkembangan yang merupakan bentuk tindakan individu dalam melakukan segala tindakan dari perbuatan pada kelakuan nilai yang mengarah pada pengetahuan/kognitif dengan mengoptimalkan kesadaran akan nilai-nilai yang merupakan tolak ukur dalam mengukur dari segala nilai-nilai yang menjadi kelakuan tindakan dan perbuatan bila mana melakukan akan menimbulkan nilai dari apa yang menjadi sifat dari nilai tersebut.

Demikian, menurut Reimer, Paolitto, Hersh (1983, hlm. 120) mengemukakan bahwa: “dalam mengajar, guru perlu mengatur kegiatan belajar dalam suatu pola interaksi sosial. Langkah-langkah pedagogis yang harus dilakukan untuk menumbuhkan penalaran moral murid –murid, meliputi: pengembangan kesadaran moral, seni bertanya dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk perkembangan moral”. Demikian menurut Darmayati Zuchdi (2009, hlm. 58)

mengemukakan bahwa: peran guru dalam hal ini ada dua macam, yaitu: 1) menciptakan konflik kognitif; 2) merangsang perspektif sosial murid-murid. Sebagaimana mengenai perilaku guru, Thomas Lickona (1991, hlm. 71- 72) dikutip oleh Darmayati Zuchdi (2009, hlm. 58) menyatakan, bahwa:

Guru dalam mengajar di kelas harus berfungsi sebagai pengasuh, model (pemberi teladan), dan mentor. Sebagai pengasuh, guru harus bisa mencintai dan menghargai murid-murid menolong mereka agar berhasil disekolah, mengembangkan kesadaran akan harga diri mereka, dan memperlakukan murid-muridnya secara bermoral sehingga mereka dapat mengalami apa yang dimaksud dengan moralitas. Guru juga harus menjadi model atau teladan sebagai orang yang beretika, yang menunjukkan dalam perilakunya rasa hormat dan tanggung jawab yang sangat tinggi baik di dalam maupun diluar kelas. Guru juga dapat memberi teladan dengan memberikan perhatian pada moralitas dan melakukan penalaran moral melalui reaksi-reaksinya terhadap kejadian-kejadian yang secara moral bermakna dalam kehidupan sekolah dan kehidupan secara luas. Sebagai mentor, guru menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan melalui penjelasan, diskusi dikelas, bercerita, pemberian dorongan, dan memberikan respons yang berupa koreksi jika murid-murid melukai perasaan teman –teman mereka atau perasaan guru.

Pendidikan nilai dan moral merupakan kesatuan sistemik dari pemberian teladan terhadap pembentukan kepribadian diri seseorang individu di dalam mengolah tindakan kepada keutamaan perilaku yang dianggap berharga dan baik serta bisa juga perilaku itu tidak wajar maupun buruk. Sebagaimana menurut Darmayati Zuchdi (2009, hlm. 43) menjelaskan, bahwa:

Titik awal pendidikan moral adalah membuat murid-murid memahami konsep moralitas. . . . membahas konsep keadilan, kejujuran, dan etika. Hal ini dapat dimulai dengan pemahaman terhadap tradisi moral. Dengan kata lain, salah satu bagian pendidikan moral di indonesia adalah menolong

generasi muda memahami tradisi moral masyarakat Indonesia. Kita dapat menolong memahami tradisi politik dan hukum yang berlaku di Indonesia (dan mengkritisnya). Kemudian, dilanjutkan dengan menggali konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti keadilan, kejujuran, kesopanan, benar, dan salah –konsep –konsep yang menjadi landasan hukum di suatu wilayah.

Berhubungan dengan itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah menjelaskan sedimentasi bahwa nilai yang merupakan titik di mana ukuran subjek diukur berdasarkan objek, analoginya bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003).

Sebagaimana menurut Dreeben (1968) dikutip oleh Nurul Zuriah (2011, hlm. 22) menyebutkan bahwa: “menurut paham ahli pendidikan moral, jika tujuan pendidikan moral akan mengarahkan seseorang menjadi bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat”.

Disamping itu, pendidikan moral ikut menentukan isi dari pendidikan, sebab pendidikan moral dipersiapkan sebagai bagian dari prinsip berpikir kritis untuk sampai kepada nilai-nilai pilihan dari penilaian moral yang dianggap sebagai pikiran dari sikap tindakan yang telah diterima (baik). Demikian pendidikan moral perlu menjadi pemahaman tentang bagaimana menyusun isi pendidikan moral sesuai dengan anggapan apa yang menjadikan diri seseorang itu menjadi orang yang bermoral.

Oleh karena itu, pendidikan moral membahas tentang cara bagaimana membentuk sebuah watak/karakter pada tindakan dari usaha sadar seseorang untuk

bisa mengkomunikasikan sebuah pengamalan nilai-nilai yang menjadi dasar nilai kepada nilai acuan dasar kehidupan terhadap pengembangan diri kepada nilai dasar instrumen ilmu pengetahuan yang bisa sejauh di mana usaha itu membawa individu tersebut dapat berkembang sesuai dengan ruang lingkup lingkungan yang berkembang dilingkungan masyarakat.

Disamping itu, sebagaimana yang ditulis oleh Thomas Lickona (2016, hlm. 32-34) dalam judul buku *Character Matters* Persoalan Karakter, menjelaskan tentang karakter sebagai transformasi moral diri yang di mana ia menyoroti tentang penelitian yang diadakan oleh seorang psikologi Anne Colby dan William Damon bahwa:

“ . . . *Pertama*, memberikan kaum muda kesempatan untuk memikirkan dan menetapkan tujuan bermanfaat yang akan mengembangkan karakter mereka dan beri mereka kesadaran bahwa setiap orang muda membutuhkan tujuan hidup. *Kedua*, untuk teladan yang memproses diri kita sendiri, sehingga anak-anak muda memiliki orang dewasa yang mempunyai tekad untuk idealisme yang tinggi dan terlibat dalam melaksanakan hal tersebut secara lebih lengkap di kehidupan mereka”.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Darmayati Zuchdi (2016, hlm. 52) dalam judul buku *humanisasi pendidikan yang menerjemahkan proses dari penelitian Kohlberg pada teori penelitian longitudinal yang dikemukakan Kohlberg dan mahasiswanya tahun 1955*, menjelaskan bahwa:

. . . . ada enam tahap dalam tingkat penalaran moral, antara lain:

1. Tahap pertama disebut moralitas heteronom. Tahap ini digambarkan sebagai suatu orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Penentuan benar atau salah di dasarkan pada konsekuensi ragawi pada suatu tindakan. Penalaran pada tahap ini sangat egosentrik, penalaran tidak dapat mempertimbangkan perspektif orang lain.

2. Tahap Kedua disebut instrumental, individualisme dan pertukaran (kebutuhan dan keinginan). Tahap ini ditandai oleh pemahaman baik atau benar sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dan keinginan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain merupakan pertimbangan utama penalaran pada tingkat ini.
3. Tahap ketiga disebut harapan, hubungan, dan penyesuaian antarpribadi. Mengerjakan sesuatu yang benar yang ada pada tahap ini berarti memenuhi harapan orang lain-orang lain, loyal terhadap kelompok, dan dapat dipercaya dalam kelompok tersebut. perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dianggap hal yang penting. Kesadaran akan perlunya saling menaruh harapan dan saling memberikan persetujuan terhadap perasaan dan perspektif orang lain, serta minat kelompok menjadi perspektif sosial seseorang.
4. Tahap ke empat adalah sistem sosial dan hati nurani. Mengerjakan sesuatu yang benar pada tahap ini berarti mengerjakan tugas kemasyarakatan dan mendukung aturan sosial yang ada. Tanggung jawab dan komitmen seseorang haruslah menjaga aturan sosial dan menghormati diri sendiri.
5. Tahap ke lima adalah kontrak sosial dan hak individual. Yang dianggap benar menurut tahap ini adalah mendukung hak-hak dan nilai-nilai dasar, serta saling menyetujui kontrak sosial, bahkan jika mengerjakan hal itu bertentangan dengan undang-undang dan aturan kelompok sosial. Orientasi penalaran tahap kelima adalah pada memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan menghargai kemauan mayoritas, disamping menjaga hak-hak golongan minoritas. Hemat simpulan pada tahap ini terjadi sebuah delimitasi antara pertentangan nilai yang menjadi penalaran dan yang seusahanya itu menilik pada perubahan dan pada sifatnya utilitarianism rational yaitu keyakinan bahwa tugas

dan kewajiban harus didasarkan pada tercapainya kebahagiaan bagi sebaaiaan besar manusia.

6. Tahap ke enam adalah prinsip etis universal. Pada tahap ini yang dianggap benar adalah bertindak sesuai dengan prinsip –prinsip pilihan sendiri yang sesuai bagi semua manusia. prinsip-prinsip diterima oleh orang yang berada pada tahap ini bukan disebabkan oleh persetujuan sosial, tetapi prinsip tersebut berasal dari ide dasar keadilan, yaitu persamaan hak-hak kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Selanjutnya menurut Darmayati Zuchdi (2016, hlm. 44) menjelaskan, bahwa: “penalaran moral merupakan intelektual. Banyak orang yang berpendapat bahwa moralitas yang sebenarnya lebih banyak berasal dari perasaan dari pada pikiran. Ajaran mencintai tetangga yang muncul dalam setiap agama besar di dunia ini, bukanlah suatu keputusan intelektual, tetapi keputusan berdasarkan pertimbangan perasaan atau hati nurani”.

Disamping itu, perlu pendekatan-pendekatan yang bisa menekan kan kepada sebuah prinsip pengetahuan proses terhadap proses yang menjadi perkembangan dari pengambilan keputusan di dalam penalaran moral yang secara teknik-teknik bisa menjadi desain di dalam meningkatkan keterampilan akan rasa kasih-pengkasihan dan mendahului keutamaan dalam kepentingan banyak orang di dalamnya. Pada dasarnya, pendekatan merupakan langkah awal dari cara untuk mengetahui sumber masalah. Sebagaimana di dalam pendidikan moral bahwa pengetahuan moral, keterampilan bernalar mengenai persoalan moral, serta perasaan kasih –mengkasih’i dan mengutamakan kepentingan orang banyak, menunjukkan bahwa ada kematangan moral. Hal tersebut, karena inti dari pengetahuan moral adalah perilaku kehidupan yang menunjukkan bahwa keadaan ilmu pengetahuan dalam diri seorang itu, apakah sesuai dengan prinsip pengetahuan yang menjadi pengetahuannya dalam bertindak atau hanya

pengetahuan belaka, karena pengetahuan merupakan objek vital dari ciri kesadaran orang yang secara sadar telah tahu akan apa yang telah menjadi pengetahuannya.

Adapun yang menjadi kesadaran terhadap nilai moral, sebagaimana mengutip dari Darmayati Zuchdi (2016, hlm. 44) menjelaskan tentang metode pendekatan yang menjadi rujukan di dalam melakukan praktek terhadap pendidikan moral yaitu dengan menggunakan metode pendekatan komprehensif, sebagaimana dari segi metode pendekatan komprehensif, antara lain, meliputi:

1. inkulkasi nilai (*inculcation*);
2. keteladanan (*modelling*);
3. fasilitasi (*fasilitation*); dan
4. pengembangan keterampilan (*skill building*).

4. Tinjauan Tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam olah proses penyelenggaraan pendidikan merupakan pendidikan yang berhubungan dengan penanaman nilai dari suasana kehidupan sosial masyarakat di dalam memberikan pengetahuan tentang perkembangan kehidupan masyarakat dalam bernegara sebagai wadah dari alat kesatuan pada kebulatan persamaan akan nilai hasrat rasa yang sama untuk kerja sama bersama dalam mencapai keinginan suatu tujuan di dalam mencapai cita-cita pada tujuan tersebut.

Berdasarkan menurut penjelasan bunyi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dalam penjelasan lampiran menjelaskan bahwa: pada BAB II dengan subjudul A. Kerangka Dasar Kurikulum dalam poin 1. Kelompok mata pelajaran tentang peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana di dalam bunyi dari Pasal 6 (ayat 1) menyatakan bahwa:

“Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kelompok mata pelajaran estetika; e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan”.

Berhubungan dengan mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, menurut dasar cakupan dari mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian adalah:

“Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian merupakan materi pembelajaran yang memuat cakupan dari suatu mata pelajaran di dalam pengembangan pembentuk kepribadian yang secara tujuan dan maksudnya merupakan usaha sadar untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan yang dimaksud yaitu bagian yang termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme” (Permen No.22 Tahun 2002).

Disamping itu, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan orientasi dari sikap pembudayaan perilaku tingkah laku warga negara di dalam mengolah nilai-nilai yang menjadi nilai kesadaran akan kehidupan yang secara orientasi memiliki misi untuk mengembangkan keadaban nilai-nilai Pancasila dan diharapkan bisa mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan

negara indonesia dimasa depan yang berkarakter watak amanah, jujur, cerdas dan bertanggung jawab.

Demikian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dari Penjelasan Pasal 77J ayat 1 ditegaskan bahwa: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, Kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Disamping itu, esensi dari model pembelajaran PPKn yang dikembangkan ialah dengan kesesuaian dari terapan model proyek belajar kewarganegaraan yang menuntut pada aktivitas kompleks, waktu yang panjang dan kompetensi yang lebih luas.

Demikian menurut Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017, hlm. 8) pada poin D Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan subjudul 1. Hakikat mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdapat dalam paragraf ke lima yang menjelaskan tentang kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis dan pedagogis mata pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013, secara utuh memiliki karakteristik. Sebagaimana bunyi dari huruf e dan f yakni bahwa:

“ . . . model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Model pembelajaran mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (*scientific*), yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi

peserta didik berpikir secara kritis, analitis dan tepat mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pelajaran. Sedangkan model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain –lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.

Adapun di dalam materi pelajaran PPKn merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang menjadi kemampuan di dalam mengolah sikap dari keterampilan pada olah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sekaligus menjadi olah pemberdayaan dan pembudayaan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang secara konsepnya untuk mencapai kualitas secara usaha sadar dan terencana dan dirancang pada tatanan konsep dari tujuan untuk segala potensi yang ada pada peserta didik dan untuk mampu dan bisa mengembangkan potensinya di dalam mengolah, memahami dan mengkonstruksikan pengetahuan agar bisa berdaya ketangguhan pada olah daya kemampuan peserta didik di dalam memecahkan permasalahan masalah pada pengetahuan dan keterampilan dari kemampuan berpikir dan keterampilan pada penalaran moral serta tindakan di dalam mengambil keputusan moral dengan melalui interaksi yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi pada proses giat-giat dari kegiatan belajar mengajar pada olah pembelajaran dikelas.

Disamping itu juga, strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan serangkaian tatanan konsep dan strategi di dalam mengembangkan pontensi yang ada di dalam diri peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan yang diperlukan oleh peserta didik sehingga di dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPKn dapat berjalan sesuai dengan apa yang

menjadi harapan di dalam perencanaan dari rencana pelaksanaan pembelajaran pada tujuan dari proses pembelajaran PPKn.

Demikian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 tahun 2004 tentang pembelajaran yang ada pada pendidikan dasar dan menengah yang secara konsep menguraikan dengan jelas tentang strategi pembelajaran yang bersumber kepada perkembangan dari implementasi kurikulum 2013. Sebagaimana, menurut Kemendikbud (2017, hlm.11) pada judul buku “Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Edisi Revisi 2017”, menyebutkan bahwa:

secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang makin lama makin meningkat dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Disamping itu, strategi dalam konteks pembelajaran bukan hanya sekedar bagian dari proses internalisasi tujuan yang hanya menginginkan tercapainya konektivitas pembelajaran yang afektif tetapi juga strategi juga harus bisa meresponden kepada optimalisasi dari mengimplementasi aktivitas yang ada pada semua rencana program pembelajaran yang telah dibuat, terutama ke aktifan peserta didik dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan kondusif serta afektif dalam penggunaan strategi yang diterapkan oleh guru pada proses giat pembelajaran.

Demikian konsep materi pengajaran PPKn yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum pada kegiatan pembelajaran yang secara kualitas harus mencapai tujuan dari konsep dan strategi pembelajaran dalam pembelajaran PPKn, sebagaimana menurut Kemendikbud (2017, hlm.12) pada judul buku ‘Buku Guru

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Edisi Revisi 2017', mengemukakan bahwa:

untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang:

- 1) berpusat pada peserta didik;
- 2) mengembangkan kreativitas peserta didik;
- 3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang;
- 1) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika dan;
- 2) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien dan bermakna.

b. Tujuan dan Fungsi PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu dari disiplin ilmu politik, hukum dan kewarganegaraan yang di mana masing-masing disiplin tersebut nampak pada fungsi dan tujuan PPKn. Sebagaimana dalam kurikulum 2004 tujuan PPKn adalah :

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dalam demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter –karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dalam bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut telah dijelaskan bahwa model yang dianut oleh PPKn adalah model terpadu yaitu batas –batas antara disiplin ilmu politik, ilmu hukum dan ilmu kewarganegaraan yang sudah tidak nampak karena setiap fungsi tersebut senantiasa telah menunjukkan adanya sebuah keterpaduan antara ketiga disiplin ilmu tersebut.

Sementara yang dikemukakan oleh A.Kosasih Djahiri (1996:19) menyatakan bahwa:

PPKn mengembangkan tri fungsi peran yang secara keseluruhan bersifat Multi program transdisipliner. Tri fungsi peran yang kembang PPKn itu adalah:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, berkepribadian Indonesia;
2. Membina manusia Indonesia yang melaksanakan politik yakni manusia Indonesia yang;
3. Melaksanakan konstitusi dan hukum;
4. Melaksanakan pembangunan;
5. Melaksanakan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, negara dan dirinya;
6. Membina pembekalan siswa (substansi dan potensi dirinya) untuk mampu belajar lebih lanjut;

Sedangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi (2004: 11) menyatakan bahwa :

Mata pelajaran kewarganegaraan atau PKn berfungsi untuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter baik, serta setia kepada bangsa dan

negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Mata pelajaran Kewarganegaraan dapat menjadi pengikat untuk menyatukan visi peserta didik yang beragam dari segi agama, sosio-kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa tentang budaya kebersamaan atau persatuan yang mendukung tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dari fungsi tersebut, maka mata pelajaran kewarganegaraan harus bersifat dinamis dan mampu menarik perhatian peserta didik, yaitu dengan cara pihak pemangku kepentingan terutama pihak sekolah bisa berperan membantu peserta didik di dalam mengembangkan pemahaman dirinya baik materi maupun keterampilan intelektual dan partisipasi dalam kegiatan sekolah berupa intra dan ekstra kurikuler. Demikian dari berbagai fungsi PPKn tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa PPKn berfungsi untuk membentuk dan menciptakan sosok manusia Indonesia yang memiliki karakter, berjiwa terampil dan cerdas serta dapat menyatukan visi yang beragam menjadi sebuah nilai budaya kebersamaan dan persatuan untuk tetap kokohnya dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, PPKn selain sebagai Pendidikan dari pengamalan Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga harus sekaligus merupakan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan dari pendidikan pengantar dari Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) serta Pendidikan Politik dan Hukum dengan tujuan peserta didik memahami kontekstual dari prinsip nilai dari perkembangan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kepribadian yang ada dan diselenggarakan oleh negara indonesia.

Adapun tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti telah diuraikan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 yaitu: “yaitu PPKn disebut kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama sosio-kultur, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamalkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian tersebut peneliti simpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya nalar, sikap dan perilaku siswa yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kemampuan belajar yang berguna untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sebagaimana, Menurut Mata pelajaran kewarganegaraan yang dikembangkan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004:12) di mana di dalam perkembangan dari pembelajaran mata pelajaran kewarganegaraan harus menitik kepada beberapa tujuan untuk bisa memberikan kemampuan kompetensi peserta didik dalam hal :

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Pembentukan diri yang didasarkan pada karakter –karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis;

c. Pola Pembelajaran PPKn

Pola pembelajaran PPKn adalah Terencana dan terstruktur berdasarkan tingkatan kebutuhan daerah dalam olah proses perkembangan pemberdayaan

masyarakat menuju masyarakat yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perisai-perisai dari benteng pertahanan negara dalam mengamankan dan menjaga keamanan bangsa dan negaranya. Dan yang kemudian dalam pembelajaran PPKn itu di kembangkan dengan materi pembelajaran dari materi unsur serapan-serapan dari bagian-bagian tata tatanan struktural ketatanegaraan yang secara pragmatis menjadi kesatuan dalam materi penyampaian yang berbasis pada pengenalan benda-benda arsitektur dari perangkat-perangkat negara dalam menjaga dan mengamankan aset-aset negara sebagai bagian dari olahan proses dari kemakmuran negara dalam berprinsip pada tujuan terbentuknya adanya negara dan bangsanya.

Adapun sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru PPKn dituntut untuk mempersiapkan materi pelajaran yang disampaikan dengan beragam dari ragam metode dan media yang digunakan oleh guru sebagai alat untuk dapat melancarkan dan memudahkan proses kegiatan pembelajaran serta olah dari pola evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan siswa baik itu dalam kognitif, afektif, dan Psikomotorik.

d. Metode Pembelajaran PPKn

Dalam penyampaian materi pelajaran diperlukan adanya suatu cara atau metode. Metode merupakan suatu cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang mana metode ini memberikan petunjuk tentang apa yang akan diajarkan guru dalam proses belajar mengajar serta membantu efektivitas siswa. Menurut A.Kosasih Djahiri (1996, hlm. 43) menyatakan bahwa “metode ini bukan hanya sekedar bicara dan menentukan kegiatan mengajar guru melainkan juga (bahkan terutama) menentukan proses belajar mengajar siswa dan perolehannya”.

Berbagai macam metode yang dapat dikembangkan dalam proses belajar mengajar seperti metode ceramah, tanya –jawab, diskusi, inkuiri, ceramah

bervariasi, pemecahan masalah, metode bermain peran teknik kualifikasi nilai, dan masih banyak contoh metode yang lainnya.

Pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki multidimensi baik aspek dari segi Multi dominannya, maka penggunaan metodenya pun di tuntut untuk bervariasi, karena setiap metode memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri.

Untuk itu seorang guru dalam memilih dan menentukan metode yang akan digunakan harus memperhatikan tujuan pembelajaran Khusus, sebagaimana menurut A.Kosasih Djahiri (1995, hlm. 47) mengemukakan bahwa: kriteria utama penggunaan jenis metode untuk satu paket bahan ajar antara lain :

1. Jenis dominan dan taksonomi yang harus diterima;
2. Jenis dan jumlah serta liputan gatra yang dibawakan PMP;
3. Lamanya waktu KBM dan KBS yang tersedia dalam satu BMP;
4. Target hasil belajar yang diharapkan baik HBU (hasil belajar utama) mampu pengiring;
5. Kemampuan siswa (kemampuan soskbud, perkembangan belajar dan fisik) serta lingkungan;
6. Sarana /fasilitas dan prasarana yang dimiliki sekolah/masyarakat serta kemampuan guru;
7. Perhitungan KBS dalam Program pengajaran lain agar tidak duplikat sejenis dan waktu untuk kegiatan rasional;
8. Faktor “X” yang mungkin terjadi di luar dugaan dan perhitungan;

Pilihan metode yang dapat dianjurkan oleh kurikulum sangat banyak, namun perlu diketahui dan diperhatikan oleh guru adalah asas “Multi metode” agar PBS lebih menarik dan mudah mencapai tujuan dengan kata lain tidak monoton dan membosankan siswa tidak hanya menjangkau satu dominan saja. Oleh karena itu,

guru harus memiliki kemampuan untuk dapat mengoperasikan metode tersebut pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

e. Media Pembelajaran PPKn

Media merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan belajar mengajar, dapat juga dengan menggunakan media akan lebih menarik bagi siswa. Menurut A. Kosasih Djahiri (1995, hlm. 31) menyatakan bahwa media dimaksudkan sesuatu yang dapat :

1. Menjadi fasilitator (pemberi kemudahan) proses KBS dan peningkatan HBR (Hasil Belajar Riil);
2. Meningkatkan kadar proses CBSA dan/atau proses KMG interaktif –interaktif;
3. Meningkatkan motivasi belajar dan/atau suasana belajar yang cerah, segar, dan merangsang;
4. Meningkatkan beban guru tanpa mengurangi kelancaran dan keberhasilan pengajaran;
5. Meningkatkan proses KBM secara efisien, efektif, dan optimal;
6. Menjadi penyela kebosanan dan kelelahan siswa maupun guru;

Agar penggunaan media sesuai dengan yang dimaksudkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut, ada sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh A.Kosasih Djahiri (1996:45) antara lain:

1. Mampu terjangkau atau terencana oleh siswa atau sesuai dengan kemampuan siswa (kemampuan belajar maupun poleksosbudhankam-nya);
2. Sesuai dengan minat, pusat perhatian dan gairah siswa;

3. Sedapat mungkin diambil dari kehidupan nyata yang bersangkutan atau realita umum;
4. Tidak berlebihan sehingga mengganggu fokus KBS;
5. Menantang untuk KBS kadar tinggi;
6. Sesuai dengan kemampuan guru;

Adapun jenis dan bentuk media dikategorikan bisa dalam:

1. Yang bersifat material (keadaan) berupa alat peraga, benda cetak (buku, koran, dll);
2. Imaterial (tak berwujud) seperti iklim, keadaan kehidupan (kaya, miskin, dll);
3. Bersifat personal (manusia), tokoh, pahlawan, nalar, sumber, dll;
4. Audio visual Aids (AVA);
5. Gerak atau penampilan seperti simulasi, permainan (Games), dll; (A.Kosasih Djahiri 1995, hlm. 31)

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa terdapat berbagai macam jenis dan bentuk media, dalam memilih dan menggunakan media harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa serta sesuai dengan situasi dan kondisinya agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang tidak dapat berdiri sendiri, karena pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peserta didik selain menguasai kompetensi yang lainnya. Selanjutnya seiring dengan perkembangan kemajuan jaman, berdampak pula pada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (2002, hlm. 12) menyatakan bahwa: “dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar. Slide, film, televisi, dan komputer yang dilengkapi CD-ROOM dan hubungan

internet dapat juga dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi tentang isu-isu International dan aktivitas kewarganegaraan di negara-negara lain”.

Pernyataan senada juga dapat diungkapkan oleh A.Kosasih Djahiri (2003, hlm. 6) bahwa : “kegiatan belajar siswa yang biasa digelar ialah antara lain lihat-dengar-baca media cetak dan elektronik; kaji telik model/ccontoh; observasi lapangan/kenyataan; pelatihan; magang/partisikotorik; studi proyek; uji coba; pengembangan model;dan lain-lain. Media sepatutnya digunakan antara lain: contoh model: foto-film/vcd; peragaan; Games model/simulasi; dan lain-lain”.

Dengan pembelajaran yang tidak berpatok pada satu jenis metode, media, sumber maupun pola evaluasi tetapi menekankan kepada prinsip pembelajarannya yang akan menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan secara kegiatan belajar siswa merupakan proses pembelajaran yang tinggi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh A.Kosasih Djahiri (2003, hlm. 7) yaitu sebagai berikut : melalui proses belajar kegiatan belajar siswa yang Multi metode –media-sumber dan evaluasi maka terbina pembelajaran yang humanistis/manusiawi, demokratis(democratic learning) dimana siswa dihargai sebagai manusia yang memiliki berbagai potensi diri, bisa melakukan berbagai pilihan dan proses aktif-normative/menyenangkan,serta pembelajaran syarat dengan kemanfaatan-meaningfull-learning kualitas hasil yang lebih mantap/lestari. Salah satu media dan sumber belajarnya adalah The real thing /realita kehidupan yang baik kemarin, kini maupun esok hari (dalam aneka peringkat lingkaran kehidupan –life crycles- dan Multi aspeknya/ipoleksosbudag).

f. Evaluasi Pembelajaran PPKn

Ruang lingkup pembelajaran PPKn yang Multi dominan (aspek) maka pola dari evaluasi yang akan diterapkan pun harus Multi sistem evaluasi, artinya menggunakan berbagai bentuk evaluasi yang disesuaikan dengan pengembangan tiga aspek taksonomi. Penilaian untuk masing-masing dominan menurut adanya

teknik dan prosedur yang berbeda agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebagaimana secara khusus mengenai evaluasi pembelajaran, menurut A.Kosasih Djahiri (1995, hlm. 53) mengemukakan berapa hal yang kiranya baik diingat dan diterapkan dalam PPKn, yaitu:

1. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk pengukuran tingkat keberhasilan belajar siswa melainkan juga tingkat keberhasilan/kegagalan mengajar, program serta reduksi dan momentum membaca kualifikasi dan atau jati dirinya (siswa), keluarga dan lingkungan kehidupannya.
2. Evaluasi jangan hanya diartikan THB/TPB atau ulangan yang cenderung bersifat administratif formal yakni mencari dan menentukan nilai/angka (jaring) melainkan mementum pengukuran diri dan atau penilaian diri(self evaluator) untuk reduksi atau remedial.

Berdasarkan hal tersebut, A.Kosasih Djahiri (1995, hlm. 53) menyatakan bahwa pola evaluasi PPKn yang sebaiknya diterapkan ialah model penilaian yang dinamakan model penilaian portofolio, yakni penilaian yang berlandaskan banyak aspek, kontinu dan terbuka.

Secara garis besar teknik pengajaran PPKn terdiri atas teknik evaluasi tes dan non tes atau melalui prosedur formal dan non formal. Dalam prosedur formal atau penggunaan tes objektif dan essay. Menurut A.Kosasih Djahiri (1992, hlm. 187) yang umum digunakan dalam tes objektif antara lain, meliputi:

- a. Pilihan ganda;
- b. Menjodohkan;
- c. Melengkapi essay;
- d. B-S (Benar-Salah);
- e. Mengenali atau bereaksi terhadap situasi kritis dan problematik;

Sedangkan teknik yang tergolong non tes atau prosedur formal, Menurut A.Azis Wahab (1992, hlm. 149) ialah:

- a. Teknik observasi

Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara diteliti dan seksama serta pengamatan secara sistematis.

b. Daftar cocok

Merupakan suatu daftar pernyataan, di mana responden tinggal memberikan tanda cek(√) pada termuat yang telah tersediakan.

c. Skala penelitian

Merupakan suatu teknik yang menggambarkan suatu nilai yang dimanifestasikan dalam bentuk angka terhadap hasil penelitian.

d. Kuesioner atau invektori

Yaitu daftar pernyataan atau butir-butir yang meminta kepada responden untuk memberikan tanda atau cek dengan cara tertentu, keduanya dapat digunakan untuk mengevaluasi minat, sikap dan nilai anak dalam membantu guna memperoleh gambaran yang jelas tentang peranan dan pengalaman siswa.

e. Wawancara.

Teknik ini berguna untuk menilai kemajuan siswa dan pengembangan nilai siswa. Dengan demikian teknik evaluasi yang dapat digunakan dalam pelajaran PPKn sangat bervariasi, untuk itu seorang guru dituntut untuk melakukan evaluasi yang bervariasi juga agar ketiga aspek dominan, kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dapat terukur.

5. Tinjauan Tentang Pembentukan Akhlak Moral dalam Proses Mata Pelajaran PPKn

Pembentukan akhlak moral dalam pembelajaran PPKn dilakukan dengan cara pembiasaan diri siswa terhadap mengembangkan kreativitasnya dalam menciptakan suasana kondisi yang bermuatan pada nilai-nilai etika, estetika, logika dan kinetika di dalam pemberian proses penerapan dari strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Sebagaimana yang telah teruraikan diatas, maka di dalam olah proses pada pembentukan akhlak moral yang dapat dilakukan dalam mata pelajaran PPKn terhadap peranan pendidikan karakter di dalam upaya pemberian penilaian sikap di dalam cakupan kegiatan pembelajaran PPKn, yaitu harus dimulai dengan :

1. Mendorong kebiasaan perilaku yang terpuji sejalan dengan nilai- nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial, dan religiositas agama.
2. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai penerus bangsa.
3. Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial.
4. Meningkatkan kemampuan menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Agar siswa memahami dan menghayati nilai- nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia

Adapun segmentasi dari langkah- langkah yang dapat di ambil untuk menanamkan akhlak moral pada anak-anak sekolah :

1. Dengan pembiasaan

Dengan pembiasaan supaya dapat dibiasakan untuk melakukan hal-hal dengan tertib, dengan baik dan teratur, semisal nya berpakaian yang rapih, masuk ke dalam kelas teratur dan sebagaimana yang menjadi ketauladanan bagi peserta didik.

2. Dengan contoh tauladan

Dalam hal ini para pendidik, guru dan orang tua harus selalu memberikan percontohan dan tauladan bagi peserta didik, janganlah guru membiasakan sesuatu bagi siswa, tetapi dirinya tidak melakukan hal tersebut. Hal ini dapat akan menimbulkan rasa tidak adil dalam diri siswa, sehingga pembiasaan itu akan dirasa sebagai pembiasaan yang dipaksakan dan sulit sekali akan menjadi disiplin yang tumbuh dari dalam diri peserta didik.

3. Dengan penyadaran/penginsafan nilai

Disamping adanya pembiasaan disertai percontohan dan tauladan, maka kepada siswa yang sudah mulai kritis pemikirannya itu, sedikit demi sedikit harus diberikan penjelasan tentang pentingnya peraturan-peraturan itu diadakan. Oleh karena dengan memberikan penyadaran nilai, peserta didik akan memahami perlahan-lahan akan menyadari nilai-nilai dan fungsi peraturan – peraturan itu tersebut. Sehingga apabila kesadaran itu timbul, berarti para peserta didik telah mulai tumbuh sesuai perkembangan akan disiplin diri sendiri.

4. Dengan pemantauan/pengawasan

Siswa adalah tetap siswa, dimana ada kesempatan yang ada kemungkinan ia cenderung untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tata tertib. Oleh karena itu, pengawasan penting sekali, lebih-lebih yang memberi kemungkinan kepada siswa untuk berbuat sesuatu yang berlawanan dengan tata tertib yang mana siswa –siswa itu berkumpul, bergabung satu kelompok (masa). Oleh karena itu, pengawasan dalam situasi masa itu lebih perketat.

6. Tinjauan Peranan Pendidikan Karakter Dalam Upaya Membangun Akhlak Moral Siswa Di Dalam Penggunaan Pada Media Pembelajaran PPKn.

Sebagaimana konsep dan strategi pembelajaran PPKn yang merupakan bagian dari prinsip kegiatan pembelajaran yang di mana berproses kepada pengembangan potensi di dalam meningkatkan daya sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi siswa agar bisa berkontribusi kepada daya ketahanan hidup dan untuk menciptakan suasana tatanan masyarakat yang teratur dan tertib serta membentuk suatu nilai identitas nasional dalam kehidupan berbangsa sesuai nilai norma dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengoptimalkan semangat dari nilai Persatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada nilai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Serta Nilai Untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Adapun tujuan lain dari misi mata pelajaran PPKn dalam esensi dan nilai dasar dari pendidikan Pancasila kewarganegaraan adalah untuk memberdayakan semua potensi yang ada pada siswa agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Demikian strategi dan arahan pembelajaran PPKn untuk dapat memfasilitasi dari pencapaian kompetensi yang telah terancang di dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri dari belajar sepanjang hayat. Disamping itu, secara kualitas model yang dikembangkan di dalam mata pelajaran PPKn ialah melalui cakupan dari isi standar pencapaian kurikulum dan terealisasi dalam proses pembelajaran yang antara lain adalah pencapaian kepada kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup siswa agar guna membentuk watak kepribadian yang berjiwa kepada nilai religius, jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif serta mandiri, rasa ingin tahu, cinta kepada ilmu serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Adapun secara hubungan dari peranan pendidikan karakter dalam usaha membangun akhlak moral siswa di dalam penggunaan media pembelajaran PPKn adalah :

1. Adanya model dari konsep pengembangan wahana pendidikan nilai yang berasumsi kepada nilai moral/karakter pancasila dan pengembangan dari kapasitas psikosional kewarganegaraan indonesia yang sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam bunyi Pasal 3 UU No.20 tahun 2003.
2. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral pancasila secara personal dan sosial.
3. Berolah keterampilan sikap berpikir kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat jiwa loyalitas kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

4. Berpartisipasi secara aktif ,cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, generasi dari tunas bangsa, dan warga negara sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan masyarakat sosial kultural.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penulisan ini didasarkan pada konsep dari kerangka berpikir pada konsep penjabaran kurikulum, sebagaimana berdasarkan pasal 36 ayat 3 UU No 20 /2003 yang menjelaskan bahwa kurikulum nasional disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam susunan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

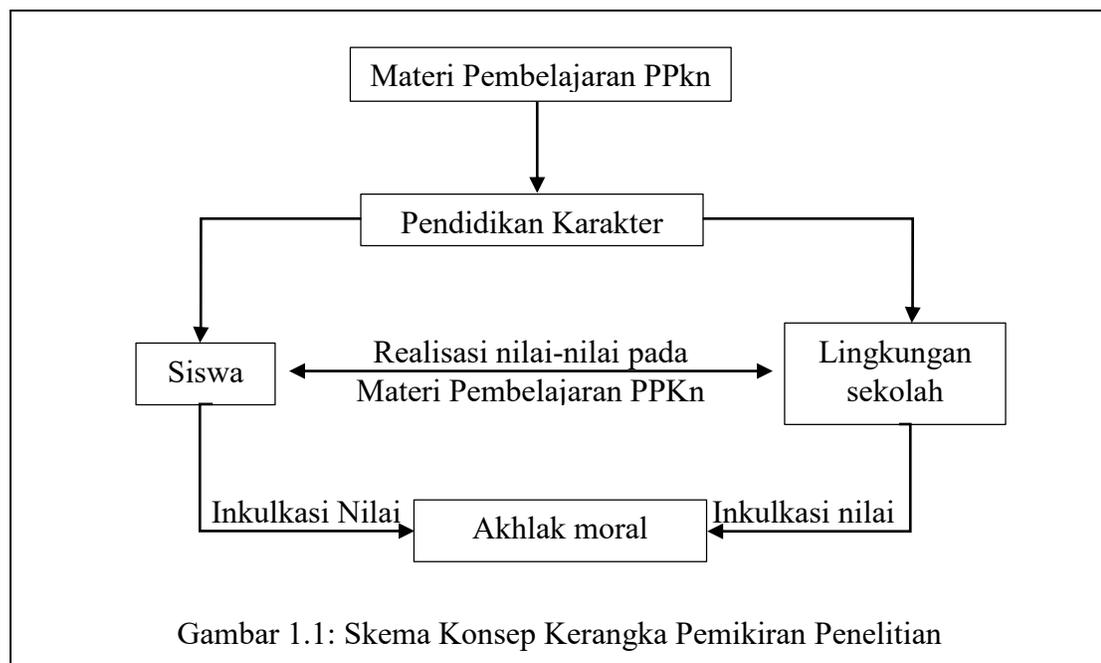
1. Peningkatan iman dan taqwa;
2. Peningkatkan ahlak mulia;
3. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik;
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
7. Agama
8. Dinamika perkembangan global; dan
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Dari sembilan poin yang menjadi perkembangan pada kerangka berpikir di dalam susunan dari konsep muatan penjabaran kurikulum diatas, maka dengan melalui program isi dari standar kurikulum pada pengelompokan mata pelajaran yang secara isi materi pada standar kurikulum yang disusun berdasarkan peraturan menteri pendidikan nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang menjelaskan pada penjelasan dari lampiran dengan memperhatikan dan menimbang dari pasal 6 (ayat 1) di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2005 menyebutkan bahwa cakupan kelompok setiap mata pelajaran yang sebagaimana cakupan dari mata pelajaran pendidikan

pancasila dan kewarganegaran merupakan sebagai mata Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Memahami itu peneliti selanjutnya melukiskan skema konsep dari kerangka pikiran di dalam meneliti peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah dalam metode kualitatif deskriptif terhadap pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas XI.

Berikut di bawah ini adalah skema dari kerangka pemikiran penelitian yang akan diselenggarakan dan diadakan oleh peneliti:



Dari skema diatas, maka yang menjadi tujuan dan fungsi materi pembelajaran PPKn, sebagaimana yang dikemukakan oleh A.Kosasih Djahiri (1996:19) menyatakan bahwa: PPKn mengembangkan tri fungsi peran yang secara keseluruhan bersifat Multi program transdisipliner. Tri fungsi peran yang di kembang oleh PPKn itu adalah:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, berkepribadian Indonesia;
2. Membina manusia Indonesia yang melaksanakan politik yakni manusia Indonesia yang;
3. Melaksanakan konstitusi dan hukum;
4. Melaksanakan pembangunan;
5. Melaksanakan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, negara dan dirinya;
6. Membina pembekalan siswa (substansi dan potensi dirinya) untuk mampu belajar lebih lanjut;

Disamping itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dengan menggunakan konsep dari model pembelajaran kontekstual dan ciri dasar pelaksanaan pendidikan karakter dengan beragam variasi penggunaan dari model, metode, media dan pola pembelajaran serta memusatkan materi pembelajaran dari pijakan kepada nilai-nilai yang menjadi nilai karakter hubungan perilaku peserta didik antara di dalam mengolah penalaran moral yang secara pendekatan menggunakan inkulkasi nilai dari metode pendekatan kompresif di dalam proses menanamkan nilai-nilai yang pada konsep penalaran nilai dan merupakan bagian dari proses perkembangan moral kepada penguatan pendidikan karakter di dalam membangun akhlak moral siswa pada alam lingkungannya. Sebagaimana, Menurut Fooster dalam Majid (2010) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 36) menyebutkan ada empat ciri dasar pendidikan karakter, antara lain:

1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hirarki nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normative dalam setiap tindakan;
2. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh ada prinsip, dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lainnya. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang;
3. Otonomi. Disana seseorang menginternalisasi aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi, ini dapat dilihat dari penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh dari desakan pihak lain;
4. Keteguhan dan kesetiaan, keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas dasar komitmen yang dipilih.

Adapun yang harus di lakukan oleh guru di dalam proses strategi pelaksanaan dari prinsip mengembangkan peranan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, sebagaimana menurut kemendiknas (2010) dikutip Heri Gunawan (2017, hlm.193) menyebutkan bahwa: strategi pelaksanaan pendidikan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan(*knowing*), pelaksanaan(*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Demikian, menurut Heri Gunawan (2017, hlm.193) menjelaskan bahwa: seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebiasaan tersebut. karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu pengetahuan tentang moral(*moral knowing*), perasaan atau pengetahuan tentang emosi atau tentang moral(*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral action*).

Disamping itu, maka guru harus mengetahui terlebih dahulu nilai yang akan dikembangkannya. Sebagaimana, yang menjadi pemusatan nilai-nilai karakter di dalam

melakukan pencapaian nilai pada inkulkasi nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah menurut Kemendiknas (2010) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 32) mengemukakan bahwa: berdasarkan pada kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, bahwa telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang kemudian dikelompokkan menjadi lima nilai hubungan perilaku hidup dari perilaku manusia di dalam pembentukan nilai kepribadian diri yang ada pada setiap individu, yaitu:

1. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan tuhan yang maha esa;
2. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri;
3. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia;
4. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya;
5. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan kebangsaannya.

Demikian, dengan mengintegrasikan materi pembelajaran PPKn kedalam peranan pendidikan karakter yang secara fungsi dan tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk menandai dari sikap peserta didik di dalam implementasi nilai-nilai yang bersumber kepada nilai ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengolahan kepribadian diri dari sosok manusia indonesia yang seutuhnya. Sebagaimana, menurut Kemendiknas (2010) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 234) dalam judul buku pendidikan karakter konsep dan implementasi, menjelaskan tentang implementasi pendidikan karakter secara terintegrasi dalam pembelajaran bahwa: yang dimaksud dengan pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai- nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam di luar kelas pada semua mata pelajaran.

Adapun konsep yang akan digunakan di dalam mengetahui peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah.

Sebagaimana pada dasarnya ada tujuh kebiasaan orang yang afektif, menurut Covey (1990) dikutip oleh Darmayati Zuchdi (2009, hlm. 142-143) mengatakan, bahwa: menemukan tujuh kebiasaan orany yang afektif, yang dibedakan menjadi kemenangan pribadi dan publik. Kemenangan pribadi, yaitu 1) bertindak proaktif; 2) mulai dengan memikirkan tujuan akhir; 3)memikirkan dan mengerjakan dulu;kemenangan publik; 4)berpikir sama-sama menang; 4)pahami dulu orang lain baru minta dipahami oleh orang lain; 6)bersinergi dan;7) mempertajam gergaji.

Dengan menginkulkasikan nilai-nilai dari proses perkembangan moral yang secara konsep pandangan pendidikan akhlak merupakan usaha sadar dan terencana dari membudayakan nilai akhlak yang secara kualifikasi terdapat beberapa nilai keutamaan dari nilai akhlak kepada tuhan yang maha esa, nilai akhlak kepada diri sendiri, nilai akhlak kepada sesama dan nilai akhlak kepada lingkungan. Demikian yang dimaksud dengan akhlak Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu meyakini bahwa akan penciptaan manusia bahwa Manusia tercipta Karena Allah dalam rupa wujud satu dan dari rupa tersebut maka dijadikannya dua rupa bentuk dalam satu wujud yang berbeda. Adapun menurut Hamzah Ya'kub (1993, hlm. 138-140) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 10) mengemukakan bahwa: kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri adalah

1. memelihara kesucian diri baik jasmani maupun rohani;
2. memelihara kerapian diri di samping kebersihan jasmani dan rohani perlu diperhatikan faktor kerapian sebagai manifestasi adanya disiplin dan keharmonisan pribadi;
3. berlaku tenang (tidak tergesa-gesa/terburu-buru), ketenangan dalam sikap termasuk kedalam rangkaian akhlakul karimah;
4. menambah pengetahuan. Hidup ini penuh dengan pergulatan dan kesulitan. Untuk mengatasinya pelbagai kesulitan hidup dengan baik diperlukan ilmu pengetahuan. Adakah kewajiban manusia menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini dan untuk beramal sebagai persiapan ke alam baka (Q.S. Az-Zumar (ayat ke -39) : surah ke -9);

5. membina disiplin pribadi, salah satu kewajiban terhadap diri sendiri, melatih diri sendiri untuk membina disiplin pribadi. Disiplin pribadi dibutuhkan sebagai sifat dan sikap yang terpuji (fadillah) yang menyertai kesabaran, ketekunan, kerajinan dan kesetiaan dan lain-lain.

Sedangkan pada kehidupan lingkungan terdapat cara bagaimana kelakuan manusia terhadap lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhaimin (2001, hlm. 24) dikutip oleh Heri Gunawan (2017, hlm. 12) mengemukakan bahwa: tugas manusia sebagai khalifah/Pemimpin yang menjaga bumi, antara lain:

1. mengkulturkan natur(membudayakan alam) yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia;
2. menaturkan kultur (meng-alamkan budaya) yaitu, budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan mala petaka bagi manusia dan lingkungannya;
3. mengislamkan kultur(mengislamkan budaya) yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai islam yang rahmatan lil'alamin sehingga berbudaya berarti mengarahkan segala tenaga cipta, rasa dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran agama islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran allah.

Sedangkan di dalam hubungannya antara akhlak dan moral adalah satu keterpaduan nilai yang menjadi landasan dasar dari menginkulkasikan nilai-nilai atau penanaman nilai-nilai yang secara pendekatan komprehensif merupakan pola dari pendidikan nilai kepada pendidikan watak yang secara keseluruhan merupakan bagian dari pengolahan pendidikan kewarganegaraan di dalam membentuk sikap kepribadian warga negara yang baik sesuai dengan wadah nilai pemersatu dari terbinanya nilai-nilai komunikatif dan fleksibel. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat terlihat di dalam mengembangkan peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah dengan menggunakan penelitian deskriptif

kualitatif pada materi pelajaran PPKn Kelas XI, Maka yang menjadi penanaman nilai-nilai dasar yang akan dilihat, antara lain:

1. Mengkomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya;
2. Memperlakukan orang lain secara adil;
3. Menghargai pandangan orang lain;
4. Mengemukakan keragu-raguan atau perasaan tidak percaya disertai dengan alasan dan dengan rasa hormat;
5. Tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki, dan mencegah kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang tidak dikehendaki;
6. Menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai yang dikehendaki secara tidak ekstrem;
7. Membuat aturan, memberikan penghargaan dan memberikan konsekuensi disertai alasan;
8. Tetap membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju;
9. Memberikan kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda-beda, apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, diarahkan untuk memberikan kemungkinan berubah;

C. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Penelitian

Asumsi atau anggapan dasar adalah landasan teori di dalam pelaporan hasil penelitian. Sebagaimana menurut Winarno Surakhmad yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (2013, hlm. 104) dalam judul buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* menyebutkan bahwa: “anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.

Demikian yang menjadi anggapan dasar atau asumsi dari penelitian ini, antara lain:

1. Sebagaimana dilihat dari tujuan pada kualifikasi nilai dari hubungan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan yang pada realisasinya memiliki hubungan pada isi program standar dari pencapaian mutu kualitas pendidikan nasional, adapun pengaruh peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa dilingkungan sekolah dapat terlihat secara olah pengembangan akan empat ciri prinsip dari pendidikan karakter yaitu adanya keteraturan interior dan koherensi keberanian membuat kepercayaan diri seseorang teguh akan terhadap daya otonomi di dalam menginternalisasikan aturan nilai-nilai sampai menjadi sebuah nilai-nilai prinsip dari dasar kelakuan nilai kepribadian di dalam memperteguh – keteguhan diri dan kesetian diri yang merupakan nilai dasar dari implementasi nilai-nilai penghormatan yang selaras dengan atas dasar komitmen yang telah dipilih oleh dirinya sendiri sehingga dapat menjadikan sesuatu realisasi nilai dari implementasi nilai pada ciri-ciri olah penanaman nilai atau inklusi nilai dengan menginterpretasi kepada tujuh sikap kebiasaan yang afektif yaitu :
 1. Bertindak proaktif dari prinsip visi pribadi dengan contoh mengkomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya;
 2. Memulai dengan memikirkan tujuan akhir dari prinsip kepemimpinan pribadi dengan contoh memperlakukan orang lain secara adil dan menghargai pandangan orang lain;
 3. Memikirkan dan mengerjakan dulu dari kemenangan publik yaitu prinsip manajemen pribadi dengan contoh memberikan kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda –beda apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima diarahkan untuk kemungkinan berubah;
 4. Berpikir sama-sama menang merupakan prinsip kepemimpinan antarpribadi dengan contoh membuat aturan, memberikan penghargaan dan memberikan konsekuensi disertai alasan;
 5. Pahami dulu orang lain baru minta dipahami oleh orang lain dengan contoh menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai-nilai yang dikehendaki secara tidak ekstrem;

6. Bersinergi: prinsip kerja sama secara kreatif dengan contoh tetap membuka komunikasi dengan pihak yang disetujui;
 7. Mempertajam gergaji: prinsip pembaharuan diri secara seimbang dengan contoh tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki, dan mencegah kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang tidak dikehendaki.
2. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pendidikan ditandai dengan ketercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Demikian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut perlu strategi dan model pembelajaran yang mampu merangsang perkembangan otak dari penalaran ilmu pengetahuan yang secara menyentuh dan menggerakkan perasaan dan mendorong peserta didik mempraktikkan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tidak saja bisa menerima dan mengungkapkan tetapi juga menerapkan apa-apa yang dipelajarinya ketika menerima bahan pelajaran. Disamping itu, dengan merencanakan program kegiatan pembelajaran yang sistematis dan terencana pada setiap giat usaha pencapaian dari penerapan strategi, metode, model dan media pembelajaran yang secara inklusif pada usaha sadar dan terencana yang secara keluaran agar bisa menempatkan dan menciptakan suasana belajar yang afektif dan efisien sesuai dengan cakupan olah dari pemberdayaan dan pembudayaan yang terdapat di dalam asas pengolahan nilai pada implementatif nilai-nilai kebutuhan dari terlaksananya pembudayaan karakter dengan tujuan dan fungsi di dalam mengedepankan sarana utama pada kualitas mutu pemberdayaan nilai-nilai karakter yang ada di dalam usaha sadar dan terencana dari pedoman penguatan pendidikan karakter yang secara evaluasi nilai dari pendidikan adalah pencapaian nilai-nilai karakter yang dikembangkan disekolah, seperti antara lain yaitu :
1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan yang maha esa;

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi kriteria nilai dari : nilai kejujuran, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu;
3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, yaitu sadar akan kelakuan nilai pada nilai sadar akan hak dan kewajibannya diri dan orang lain, nilai patuh (sikap tahu-dari tahu mentaati aturan) pada aturan-aturan sosial, nilai menghargai karya dan prestasi orang lain(penghormatan atas jasa maupun nilai istimewa), nilai bertutur(nilai dari olah kata dan kalimat dari nilai mengolah kata dan kalimat yang tidak etis(tidak pantas/pantas), nilai pergaulan(olah dari interaksi komunikatif bersosialisasi dengan meragamkan pandangan pada humanis(manusia yang me-manusiakan manusia));
4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungannya, seperti pembersihan lingkungan sekitar dan mencegah degradasi yang membahayakan lingkungan alam;
5. Nilai kebangsaan, yaitu menghormati perjuangan bangsa dengan mengabdikan diri sebagai pembela negara dari cara mencegah diri dari invansi yang menjadi ancaman bagi keutuhan dari kedaulatan wilayah bangsa dan negara, serta ikut meramaikan hari-hari nasional, cinta akan ilmu kewarganegaraan indonesia.

Disamping itu, di dalam evaluasi proses belajar mengajar pendidik juga harus bisa memberikan keteladanan nilai berupa ungkapan kata atau kalimat intuitif dari proses pembangunan akhlak moral siswa di dalam olah materi pengajaran pembelajaran PPKn yang secara terlaksana dan teracarakan melalui teknik-pendekatan dan model dari strategi pembelajarannya yaitu untuk mengarahkan pada pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar bisa setiap individu mampu menjadi pembelajar yang mandiri dari prinsip belajar sepanjang hayat. Demikian itu juga, secara konsep pengajarannya: guru memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk bisa

mengarahkan dan mengembangkan suasana belajar yang berelaborasi pada ruang model desain pembelajaran yang sedemikian dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, sehingga mereka menjadi sadar dan secara sadar bisa menggunakan role pembelajaran mereka sendiri agar bisa berkembangnya daya nalaristik untuk bisa menjadi giat aktif belajar, dengan demikian juga, perlu perhatian yang serius terutama pada pelakuan seni bermain peran di dalam kepribadian guru untuk bisa terlebih dahulu guru harus bisa mengembangkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa memainkan peranannya sebagai aktor yang akan menjadi pusat berlangsungnya kegiatan dari proses *role model* pembelajaran yang ada dan sebisanya keberlangsungan itu berlanjut dengan pencapaian teori di dalam mengolah fokus pada olah kinetika rasa, prasa dan cipta melalui media olah penyampaian teori materi kajian yang telah tersajikan dengan ragam pandangan tujuan dan fungsi dari inti tujuan pelaksanaan pembelajaran yang awal dan akhir itu bisa mendekati keberhasilan dari tercapainya sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran dikelas.

3. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan mental dan fisik melalui olah dari implementasi interaksi antara peserta didik, guru, lingkungan, sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Pada hakikinya guru merupakan seseorang yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan pada kedudukannya juga, guru menempati posisi kedudukan yang terhormat di masyarakat sebab sebagaimana masyarakat meyakini bahwa gurulah yang dapat mendidik anak mereka agar menjadi orang yang berkepribadian yang mulia. Demikian menurut Syaiful Bahri Djamarah (2010, hlm. 41) menyebutkan guru perlu memahami karakteristik anak didik sehingga mudah melaksanakan interaksi edukatif. Kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif, berpangkal dari kedangkalan pemahaman guru

terhadap karakteristik anak didik sebagai individu. Bahkan metode, sarana/alat dan evaluasi tidak dapat berperan lebih banyak, bila guru mengabaikan aspek anak didik. Sebaiknya sebelum guru mempersiapkan tahapan-tahapan interaktif edukatif, guru memahami keadaan anak didik, ini penting agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara akurat, sehingga terciptanya interaksi edukatif yang kondusif, efektif dan efisien.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah atau submasalah yang secara teori telah dinyatakan dalam kerangka pemikiran dan masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Demikian di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah kedalam suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan sementara tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Bila rumusan masalah tentang antara lain :

1. Bagaimana peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah terhadap olah materi pembelajaran PPKn siswa kelas XI?
2. Bagaimana proses dari pengajaran materi pembelajaran PPKn terhadap peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah?
3. Bagaimana hambatan yang dirasakan oleh guru PPKn dalam peranan pendidikan karakter pada upaya pembangunan akhlak moral siswa di lingkungan sekolah terhadap olah materi pembelajaran PPKn kelas XI?

Maka, Hipotesis (jawaban sementara) antara lain:

1. Ada peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah terhadap olah materi pembelajaran PPKn siswa kelas XI dengan bukti pernyataan yang menjadi standar kualifikasi ukur dari ada atau

tidak ada peranan pendidikan karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah.

2. Sebagaimana hasil proses dari pengajaran PPKn di dalam peranan Pendidikan Karakter dalam upaya membangun akhlak moral siswa di lingkungan sekolah yaitu adanya penilaian sikap di dalam proses pemberian materi pelajaran PPKn disetiap Bab dari Materi yang ada di dalam Buku Pedoman Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Kelas XI.
3. Sebagaimana hambatan yang dirasakan oleh guru PPKn dalam peranan pendidikan karakter pada upaya pembangunan akhlak moral siswa di lingkungan sekolah terhadap olah materi pembelajaran PPKn kelas XI yaitu cenderung kearah keterbatasan pada cara bagaimana peserta didik mengolah dan menanggapi respon pendidik di dalam mengkomunikasikan nilai-nilai olah dari ilmu pengetahuan dan keterampilan nilai untuk bisa di transmisikan kedalam sumber nilai-nilai perbuatan dan tindakan dari sejauh mana peserta didik melakukan dan membiasakan serta mengaktifkan nilai tersebut kedalam implementasi pemberdayaan diri kepada daya otonomi yang ada pada dalam kepribadian diri peserta didik tersebut.